



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1555, 2017

BPPT. Renstra Tahun 2015-2019.

PERATURAN  
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI  
NOMOR 13 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN  
TEKNOLOGI TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu mengganti Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TAHUN 2015-2019.

#### Pasal 1

Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2015–2019 yang selanjutnya disebut RENSTRA BPPT sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 2

RENSTRA BPPT adalah:

- a. dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019; dan
- b. memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan bersifat indikatif.

#### Pasal 3

RENSTRA BPPT digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dalam bentuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan, serta pengukuran akuntabilitas kinerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selama Tahun 2015–2019.

#### Pasal 4

Pimpinan Unit Kerja menyiapkan rancangan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RENSTRA BPPT dan prioritas program pembangunan nasional.

#### Pasal 5

RENSTRA BPPT akan dievaluasi setiap tahun dan disesuaikan dengan perkembangan strategis organisasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2017

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN  
PENERAPAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

UNGGUL PRIYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

## LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 13  
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 4  
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN RENCANA  
STRATEGIS BADAN PENGKAJIAN DAN  
PENERAPAN TEKNOLOGI TAHUN 2015-2019

## RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI  
TAHUN 2015-2019

## BAB 1

## PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (RPJPN) 2005–2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Dalam RPJPN 2005–2025 disebutkan bahwa persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dalam rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis Iptek. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan penerapan Iptek nasional, tantangan yang dihadapi adalah perlu adanya peningkatan kontribusi Iptek untuk memenuhi hajat hidup bangsa; menciptakan rasa aman; memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, energi, dan pangan; memperkuat sinergi kebijakan Iptek dengan kebijakan sektor lain; mengembangkan budaya Iptek di kalangan masyarakat;

meningkatkan komitmen bangsa terhadap pengembangan Iptek; mengatasi degradasi fungsi lingkungan; mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam; serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya Iptek, baik sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, maupun pembiayaan Iptek.

Kondisi saat ini menunjukkan, bahwa penguasaan dan pemanfaatan teknologi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berbagai hasil penelitian, kerekayasaan dan pengembangan teknologi telah dimanfaatkan oleh kelompok industri dan masyarakat. Meskipun demikian, kemampuan teknologi secara nasional dalam penguasaan dan penerapan teknologi dinilai masih belum memadai untuk meningkatkan daya saing bangsa. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh masih rendahnya sumbangan teknologi terhadap sektor produksi nasional, belum efektifnya mekanisme intermediasi, lemahnya sinergi kebijakan, belum berkembangnya budaya Iptek di masyarakat, dan terbatasnya sumber daya Iptek.

BPPT merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai sumber dan infrastruktur teknologi nasional yang diperlukan untuk mendorong daya saing perekonomian nasional. Renstra BPPT 2015–2019 memuat misi, visi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPPT yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2015–2019.

## 1.1. Kondisi Umum

### 1.1.1 Global

Kondisi geoekonomi global saat ini dan ke depan akan merupakan tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia dalam lima tahun ke depan. Tantangan dan peluang terkait dengan peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi antara lain adalah:

- a. Pusat ekonomi dunia ke depan diperkirakan akan bergeser terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik.

- b. Harga komoditas secara umum diperkirakan menurun, namun harga produk manufaktur dalam tren meningkat.
- c. Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang telah dimulai sejak tanggal 31 Desember 2015.

Peningkatan daya saing perekonomian Indonesia menjadi hal utama yang perlu menjadi perhatian. Titik berat peningkatan daya saing perekonomian perlu diarahkan pada peningkatan infrastruktur dan ketersediaan energi, peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, serta tata kelola birokrasi yang lebih efisien. Peningkatan daya saing perekonomian ini perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang kondusif, yang tidak menciptakan rente ekonomi maupun ekonomi biaya tinggi. Peningkatan infrastruktur akan dititikberatkan pada upaya untuk meningkatkan konektivitas nasional, sehingga integrasi domestik ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa antar wilayah di Indonesia.

#### 1.1.2 Nasional

Dalam menghadapi kondisi lingkungan strategis dan berbagai tantangan tersebut di atas, Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai kendala. Posisi daya saing Indonesia jika diukur dengan indeks daya saing global (Global Competitiveness Index-GCI) berdasarkan laporan World Economic Forum pada tahun 2014-2015 dari peringkat 54 pada tahun 2009-2010 menjadi peringkat 37 pada tahun 2015-2016. Peringkat daya saing ini lebih rendah dibandingkan Malaysia (18), Thailand (32), dan lebih tinggi dibandingkan Vietnam (56), Filipina (47), Kamboja (90) dan Timor-Leste (136).

Pemeringkatan daya saing tersebut merupakan resultan dari kinerja 12 pilar, yaitu: Institusi, Infrastruktur, Lingkungan Ekonomi Makro, Kesehatan dan Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi dan Pelatihan, Efisiensi Pasar Barang, Efisiensi Pasar Tenaga Kerja, Pasar Finansial,



Kesiapan Teknologis, Ukuran Pasar, Kecanggihan Bisnis, dan Inovasi. Diantara pilar daya saing tersebut, terdapat tiga (3) pilar yang berkaitan langsung dengan daya dukung

teknologi, yaitu: (1) Kesiapan Teknologi, (2) Kecanggihan Bisnis, dan (3) Inovasi. Nilai ketiga pilar daya saing tersebut relatif rendah (nilai Kesiapan Teknologi 3,6, Kecanggihan Bisnis 3,8 sedangkan Inovasi 3,9 dari skala 1-7) dibandingkan dengan sembilan pilar lainnya (kecuali Efisiensi Pasar Tenaga Kerja). Hal ini mencerminkan bahwa iptek belum berperan secara signifikan dalam meningkatkan daya saing Indonesia. Kemampuan teknologi secara nasional dalam penguasaan dan penerapan teknologi dinilai masih belum memadai untuk meningkatkan daya saing bangsa.

#### 1.1.3 Pencapaian Periode 2010-2014

Kondisi saat ini menunjukkan, bahwa penguasaan dan pemanfaatan teknologi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berbagai hasil penelitian, kerekayasaan dan pengembangan teknologi telah dimanfaatkan oleh kelompok industri dan masyarakat. Beberapa capaian BPPT selama periode 2010-2014 antara lain:

##### a. Capaian Peningkatan Sarana Prasarana Iptek

BPPT sebagai salah satu Lembaga Riset dibawah koordinasi Kementerian Riset dan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), sejak tahun 2008 telah mempersiapkan diri untuk menjawab tantangan ke depan dengan membangun pusat-pusat riset baru maupun pengembangan pusat-pusat riset yang ada melalui program pembangunan & revitalisasi laboratoria, melalui Program Pengembangan Laboratoria BPPT Terpadu.

Pusat Rekayasa yang baru dibangun terdiri dari beberapa klaster antara lain: Klaster 1: Pusat Rekayasa Teknologi Produksi dan Manufaktur Dasar; Klaster 2: Pusat Rekayasa Teknologi Material dan Proses; Klaster 3: Pusat Rekayasa Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Pusat Rekayasa Teknologi Hankam; Klaster 4: Pusat Rekayasa Geostech (Geo Engineering Science and Technology); Klaster 5: Pusat Rekayasa Teknologi Energi; Klaster 6: Pusat Inovasi

dan Bisnis Teknologi. Pusat Rekayasa ini melengkapi Laboratoria yang telah ada yaitu: Balai Inkubator Teknologi (BIT), Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BB-TMC), Balai Teknologi Survei Kelautan(Balai Teksurla), Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah (BTPAL), Balai Bioteknologi (BBIO), Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi(BJIK), Balai Teknologi Polimer (BTP), Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Desain (BTB2RD), Balai Besar Teknologi Konversi Energi(B2TKE), Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi (BT2MP), Balai Teknologi Mesin Perkakas, Produksi dan Otomasi (BT MEPPPO), Balai Besar Kekuatan Struktur(B2TKS), Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika dan Aeroakustika (BBTA3).

- b. Capaian Kegiatan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Iptek dalam RPJMN 2010-2014 terdiri atas Prioritas Nasional (11 prioritas) dan Prioritas Nasional lainnya. BPPT pada tahun 2012 mempunyai 8 program prioritas nasional yang tercantum dalam 5 Program Nasional, sedangkan untuk Tahun 2013 sampai dengan hanya 1 (satu) Program Prioritas Nasional yaitu Program Prioritas Nasional Lainnya di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berupa Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan.

1) Program Prioritas Nasional

- a) Program Aksi di Bidang Pangan - Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pupuk Berimbang (Prioritas 5)

Pada Tahun 2012 telah diselesaikan: Pilot Project Pupuk Mineral *Fertilizer*, *Pilot Project* Pupuk Lepas lambat (SRF), *Pilot Plant* Teknologi Pupuk BCOF, dan *Pilot Plant* Produksi Pupuk Hayati Majemuk.

Pada tahun 2013 dilaksanakan “rekomendasi inventarisasi bahan baku

industri pupuk, rekomendasi teknologi proses dan peralatan industri pupuk, dan Rekomendasi kebijakan industri pupuk nasional”, rekomendasi pupuk berimbang untuk mendukung program revitalisasi industri pupuk nasional termasuk rekomendasi pola sebaran kebutuhan pupuk sesuai karakteristik tanah dan rekomendasi engineering peralatan pabrik pupuk. Pada Tahun 2014 dapat dicapai peningkatan kinerja peralatan *pilot project* pupuk SRF-NPK di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, sehingga secara kualitas pupuk SRF-NPK granul yang dihasilkan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, dan secara kuantitas produksi pupuk meningkat menjadi kapasitas 10.000 ton/tahun.

- b) Energi-Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Skala Kecil untuk Kemandirian Bangsa (Prioritas 8)

Kegiatan ini difokuskan pada pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) skala kecil hingga kapasitas 5 MW dengan menerapkan teknologi condensing turbine and binary cycle melalui kerjasama dengan industri manufaktur dalam negeri seperti PT. Nusantara Turbin dan Propulsi (manufaktur turbin), PT. Pindad (generator), PT. Boma Bisma Indra (condenser, demister, jet ejector), dan lain-lain, dengan target meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) secara maksimal.

Pilot plant PLTP condensing turbine dengan kapasitas 3 MW telah dibangun di lapangan panas bumi Kamojang, Jawa Barat, melalui kerjasama dengan PT. Pertamina

Geothermal Energy (suplai uap panas bumi) dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat (menyediakan lahan), serta PT. PLN (penyaluran listrik). Pilot plant PLTP binary cycle dengan kapasitas 100 kW dibangun di lapangan panas bumi Wayang Windu, Jawa Barat, melalui kerjasama dengan Star Energy Geothermal Ltd. (menyediakan brine dan lahan).

Pada Tahun 2012 telah diselesaikan: Prototip Komponen Turbin PLTP 5MW, Pilot Plant PLTP Binary Cycle 100 KW. Sedangkan dalam Tahun 2013 dilaksanakan: Pengujian Kinerja PLTP 3 MW, Pengujian Pilot Plant PLTP Binary Cycle 100 KW, dan Pilot Plant PLTP Binary Cycle.

- c) Lingkungan Hidup dan Bencana-Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global (Prioritas 9)

Pada Tahun 2012 telah diselesaikan sistem Measurable, Reportable, dan Verifiable (MRV) Nasional dan hasil kajian neraca karbon laut, teknologi penyerapan dan penangkapan CO<sub>2</sub> secara biologi serta pemanfaatan biomasa mikroalgae, dan monitoring dan prediksi iklim dan muka air laut.

Pada Tahun 2013 dilaksanakan “Rekomendasi Monitoring Karbon dan Implementasi Kota Hijau, Prototipe Teknologi Penyerapan Karbon Dengan Mikroalgae, dan Rekomendasi Teknologi Konservasi Biomassa”.

- d) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik - Dari Air Payau Menjadi Air Minum (Prioritas 10)

Pada tahun 2012 BPPT telah menerapkan teknologi osmosa balik untuk Penanggulangan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih di 4 (empat) lokasi, yakni: Pesantren Asy-Syifa, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang; Pesantren Mathla'ul Anwar Linahdhatil Ulama (Malnu), Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang; Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes; dan Desa Kuala Lupak, Kabupaten Barito Kuala.

a) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi (Prioritas 11)

1) Inkubator Teknologi dan Penjaringan Calon Wirausahawan

Inkubasi bisnis oleh BPPT bertujuan untuk menciptakan wirausaha baru berbasis teknologi (PPBT) yang tangguh, mandiri dan berdaya saing. Sampai dengan tahun 2012, BPPT telah menginkubasi empat PPBT, yaitu PT Mikata Sukses Mandiri (produsen pupuk hayati technofert), CV Nusaroma (produsen minyak atsiri kualitas tinggi), CV Nanotech (produsen partikel nano ZnO) dan PT Surya Utama Teknik (produsen pelorot malam batik, bekerja sama dengan Inkubator Teknologi Pekalongan).

2) Audit Kemampuan Industri untuk Mendukung Penyediaan Listrik Nasional

Pelaksanaan audit teknologi kelistrikan pada tahun 2012 ditujukan untuk mengetahui kapabilitas teknologi industri manufaktur dalam negeri guna mendukung infrastruktur ketenagalistrikan. Hal-hal teknis yang tercakup

dalam kegiatan ini meliputi kemampuan desain, kemampuan produksi dan kualitas produk yang dihasilkan. Beberapa industri komponen utama kelistrikan yang diaudit BPPT adalah PT. Pindad memproduksi generator, PT. Nusantara Turbin Propulsi (NTP) memproduksi Turbin, PT. PAL memproduksi balance of plant (komponen atau peralatan pendukung), PT. Alstom Power ESI memproduksi Heat Recovery System Generator (HRSG).

Pada tahun 2012 telah diselesaikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Litbang untuk mendukung kemandirian industri nasional, dan pada tahun 2013 sedang dilaksanakan “Layanan Teknologi Pelaksanaan Audit Teknologi, dan Layanan Teknologi Sistem Manajemen Proses”.

3) Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perisalah adalah sistem pembuat risalah dan resume pertemuan menggunakan teknologi pengenalan wicara (speech recognition) dan peringkasan dokumen (document summarization) dengan bahasa Indonesia. Perisalah merekam suara percakapan manusia dan mengubahnya langsung menjadi teks secara real time, runut sesuai jam, menit dan detiknya.

Pada tahun 2012 telah diselesaikan “Desain dan prototip USG,

Sistem Aplikasi Perisalah (penterjemah notulensi) dan Rekomendasi Sistem Pemilu Elektronik”, dan pada tahun 2013 dilaksanakan “Rekomendasi Sistem Pemilu Elektronik, dan Sistem Aplikasi Perisalah”.

2) Program Prioritas Nasional Lainnya

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan - Pesawat Udara Nir Awak untuk Skuadron TNI AU Bekerjasama dengan Badan Litbang Kementerian Pertahanan, dan Keamanan pada tanggal 11 Oktober 2012, bertempat di Landasan udara militer Halim Perdanakusumah, telah dilaksanakan uji demo *flight* Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) Wulung disaksikan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Riset dan Teknologi, Kepala BPPT, Kepala Staf TNI, dan para undangan. Demo flight berhasil sukses sehingga Menteri Pertahanan dan Keamanan membuat keputusan politis bahwa PUNA-BPPT segera digunakan untuk memperkuat skuadron Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) TNI AU di Kalimantan.

Pada tahun 2012 dilakukan “Prototipe PUNA Tipe jangkauan jarak menengah dengan *Telemetry, Control and Command* (TCC)”. Tahun 2013 dilaksanakan “Lanjutan Prototipe Sistem PUNA Tipe jangkauan jarak menengah dengan *Telemetry, Control and Command* (TCC)”, dan pada tahun 2014 telah diproduksi PUNA Wulung sebanyak 3 (tiga) buah.

1.1.4 Ekspektasi Pemangku Kepentingan dan Pelanggan

Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok BPPT harus ditinjau dari perspektif pemangku kepentingan (lembaga pemerintah, aliansi/pelanggan dan masyarakat), sebagaimana dalam *tabel 1.1* berikut:



Tabel 1.1. Ekspektasi Pemangku Kepentingan dan Pelanggan

	Pemangku Kepentingan	Lembaga	Ekspektasi/Perspektif
1.	Lembaga Pemerintah Pihak-pihak yang berkepentingan atau memiliki harapan terhadap perkembangan kinerja dan program BPPT	Presiden dan Kabinet	Kontribusi BPPT terhadap perkembangan ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa
2.	Pelanggan ( <i>Customer</i> )/aliansi		
	a. Pelanggan/ <i>Customer</i> Pihak yang menggunakan produk dan pelayanan BPPT	Industri	Ketersediaan sumber daya teknologi untuk melakukan inovasi, pendalaman proses pertambahan nilai, dan pembaruan proses produksi untuk meningkatkan keuntungan.
		Pemerintah	ketersediaan sumber daya teknologi/rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pelayanan publik
	b. Aliansi Lembaga yang	Lembaga, Litbangyasa,	Efektivitas melakukan

	Pemangku Kepentingan	Lembaga	Ekspektasi/Perspektif
	bekerjasama dengan BPPT sebagai partner yang mempunyai tujuan, sasaran dan interes bersama	Perguruan Tinggi	pembaruan ilmu pengetahuan dan teknologi
3.	Masyarakat	DPR, Masyarakat Umum	Keluaran dan produk BPPT dapat dimanfaatkan secara luas, meningkatkan kualitas hidup, lingkungan dan ekonomi secara keseluruhan.

Sejalan dengan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN, BPPT dalam menyusun program dan kegiatannya mengacu pada Perpres No.2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawacita) Presiden/Wakil Presiden. Program dan kegiatan BPPT mendukung pencapaian RPJMN 2015-2019 dalam hal sebagai berikut:

- a. Misi ke-lima dari Nawacita yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing” yang selanjutnya dijabarkan dalam Agenda prioritas ke-enam dari sembilan agenda prioritas Nawacita, yaitu “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya”.
- b. Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi *daya saing sektor produksi*, maka pembangunan diarahkan pada:
  - (a) Penyelenggaraan Litbangyasa, antara lain untuk mendukung bidang:
    - i. Kedaulatan pangan pada pencarian bibit unggul tanaman pangan yang mampu tumbuh subur di lahan suboptimal di lahan gambut dan teknologi industri pangan (sagu, jagung, singkong, sorghum) dan diversifikasi produknya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dimanfaatkan masyarakat;
    - ii. Energi pada inovasi dan layanan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) berskala kecil (100 kw-5 MW);
    - iii. Kesehatan pada pengembangan teknologi produksi bahan baku obat (BBO) seperti antibiotik, bahan biofarmasi, dekstrosa, dan bahan baku obat lainnya;
    - iv. Teknologi transportasi-inovasi dan layanan teknologi industri perkapalan;
    - v. TIK riset pada pengembangan infrastruktur TIK khususnya IT Security; pengembangan sistem dan framework/ platform perangkat lunak berbasis Open Source khususnya industri TIK pendukung e-Government & e-Business;
    - vi. Hankam riset akan difokuskan pada mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan industri strategis pertahanan dan keamanan;

- vii. Material maju pada material baterai padat.
  - (b) Layanan Perencanaan dan Teknologi melalui peningkatan kapasitas layanan dan revitalisasi peralatan laboratorium serta peningkatan kualitas dan jumlah SDM yang akan dibiayai dari dana pemerintah.
  - (c) Penguatan Kerjasama Swasta-Pemerintah-Perguruan Tinggi khususnya untuk sektor pertanian dan industri serta pengembangan entrepreneur pemula lewat pembangunan inkubator.
- 2) Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya Nirhayati melalui pembangunan Pusat Inovasi Teknologi Maritim di Pantai Penajam – Kalimantan Timur dan pengembangan teknologi mitigasi bencana.
  - 3) Pembangunan taman tekno dan taman sains melalui revitalisasi Inkubator Teknologi-BPPT di Puspiptek dan pembangunan Pusat Inovasi Teknologi Maritim di Penajam–Kalimantan Timur, serta taman tekno di kabupaten/kota.

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

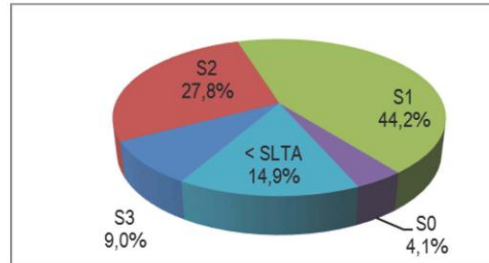
Identifikasi potensi dan permasalahan BPPT dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPPT dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan RPJMN 2015-2019.

### 1.2.1. Potensi

Potensi BPPT yang meliputi sumberdaya manusia, fasilitas sarana dan prasarana meliputi hal-hal sebagai berikut:

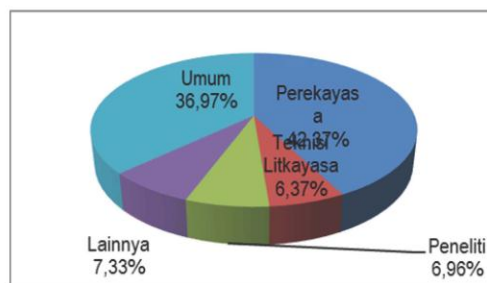
- a. BPPT memiliki SDM dengan tingkat pendidikan dari berbagai disiplin ilmu dan bidang keahlian. Dari total SDM sebanyak 3020 orang, tingkat pendidikan S3 sebesar 8,99%; S2 sebesar 27,8%, S1 sebesar 44,2%

dan S0 sebesar 4,082%. Sedangkan untuk pegawai dengan tingkat pendidikan paling tinggi SLTA sebanyak 14,9 %.



Gambar 1.1 SDM BPPT Menurut Tingkat Pendidikan

Disisi lain sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dalam bidang litbangyasa teknologi, pegawai BPPT terdistribusi dalam berbagai jenis jabatan fungsional antara lain jabatan fungsional Perakayasa 42,37%, Peneliti 6,96%, Teknisi Litkayasa 6,37%. Selain jabatan fungsional tersebut diatas, terdapat beberapa jabatan fungsional tertentu lainnya seperti Arsiparis 2,12%, Perencana 2,12%, Pranata Humas 1,49%. Auditor 0,56%, Analisis Kepegawaian 0,56%, Pengendali Dampak Lingkungan 0,20%, dan Pustakawan 0,17%. Sedangkan untuk jabatan fungsional umum (Non Fungsional Tertentu) sebesar 36,97%.



Gambar 1.2 SDM BPPT Menurut Jenis Jabatan Fungsional

- b. Kompetensi BPPT yang spesifik dalam Audit Teknologi, yaitu kemampuan untuk melakukan evaluasi secara sistematis dan obyektif terhadap aset teknologi dalam rangka: (i) memberikan nilai tambah kepada pihak

yang diaudit atau pemilik kepentingan, dan (ii) menjamin kegiatan pengkajian dan penerapan teknologi sejalan dengan kepentingan nasional.

- c. BPPT memiliki infrastruktur (laboratorium, workshop, pilot plant) yang lengkap dan maju yang terakreditasi dan tersertifikasi sesuai standar internasional, sebagai berikut:
- (1) Klaster 1: Pusat Rekayasa Teknologi Produksi dan Manufaktur Dasar; Klaster 2: Pusat Rekayasa Teknologi Material dan Proses; Klaster 3: Pusat Rekayasa Teknologi Informasi dan Komonukasi serta Pusat Rekayasa Teknologi Hankam; Klaster 4: Pusat Rekayasa Geostech (Geo Engineering Science and Technology); Klaster 5: Pusat Rekayasa Teknologi Energi; Klaster 6: Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi.
  - (2) Pusat Rekayasa ini melengkapi Laboratoria yang telah dibangun di kawasan ini antara lain: Balai Inkubator Teknologi (BIT), Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BB-TMC), Balai Teknologi Survei Kelautan (Balai Teksurla), Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah (BTPAL), Balai Bioteknologi (BBIO), Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi (BJIK), Balai Teknologi Polimer (BTP), Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Desain (BTB2RD), Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE), Teknologi Industri. Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR), Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi (BT2MP), Balai Teknologi Mesin Perkakas, Produksi dan Otomasi (BT MEPP0), Balai Besar Kekuatan Struktur (B2TKS), Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika dan Aeroakustika (BBTA3)
- d. BPPT menggunakan sistem tata kerja rekayasa yang bercirikan kerja tim (team work), terstruktur (well structured) and terdokumentasi (well documented).

- e. BPPT memiliki jaringan (networking) yang luas dengan mitralitbangyasa (dalam dan luar negeri).

#### 1.2.2. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi di BPPT yaitu :

- a. Pemanfaatan hasil Litbangyasa yang belum optimal.

Berdasarkan pelaksanaan Pengukuran dan Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran BPPT Tahun 2011 yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-KL, pengukuran tersebut belum mencerminkan aspek manfaat dari pelaksanaan RKA-KL.

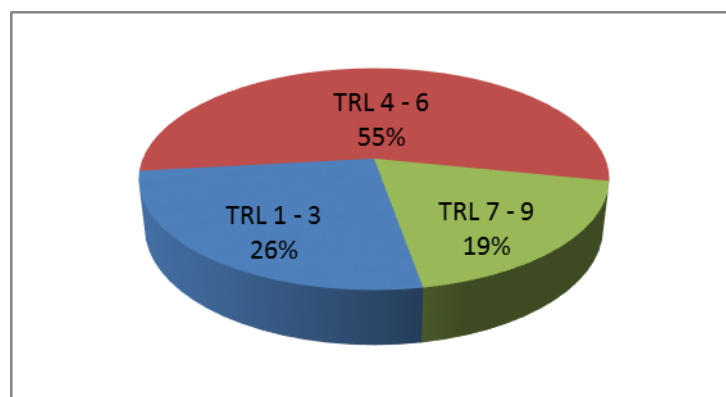
Dalam mengevaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan di BPPT menggunakan metode TRL (*Technology Readiness Level*) yang memiliki filosofi kegiatan dalam kerekayasaan teknologi, yaitu *Research, Development, Engineering, and Operation* (R, D, E & O). Dengan alat ukur ini maka dapat diketahui tingkat kesiapan dan risiko dari suatu teknologi untuk menuju ke tahap penerapan.

Kesembilan level kesiapan teknologi (TRL, *Technology Readiness Level*) didefinisikan sebagai berikut:

- TRL 1 : Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan
- TRL 2 : Formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi
- TRL 3 : Pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental
- TRL 4 : Validasi kode, komponen dan/atau *breadboardvalidation* dalam lingkungan laboratorium

- TRL 5 : Validasi kode, komponen dan/atau *breadboard validation* dalam suatu lingkungan simulasi
- TRL 6 : Demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan
- TRL 7 : Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya
- TRL 8 : Sistem telah lengkap dan memenuhi syarat (*qualified*) melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya
- TRL 9 : Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian

Berdasarkan hasil Evaluasi Kegiatan BPPT Tahun 2015 (gambar 1.3. Hasil Evaluasi TRL Kegiatan 2015), mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan BPPT Tahun 2015 masih dalam area *Risk Technology* (TRL 1-3= 26% & TRL 4-6 = 55%), sedangkan yang sudah masuk kedalam area *Risk Market* (TRL 7-9= 19 %)



Gambar 1.3. Hasil Evaluasi TRL Kegiatan 2015

Kondisi menunjukkan permasalahan BPPT antara lain:

- 1) Masih rendahnya keseimbangan antara syarat teknis dengan syarat ekonomis.
- 2) Masih lemahnya kemitraan dengan industri
- 3) Kurangnya kolaborasi dengan Lembaga komersialisasi/Investor atau Industri Strategis.



- 4) Masih lemahnya kemampuan pemasaran produk hasil litbangyasa BPPT.

Sedangkan faktor hambatan eksternal BPPT antara lain: banyak perusahaan yang terikat oleh peraturan prinsipal di luar negeri, serta *political will* pemerintah lemah (misalnya aturan tentang *royalty* untuk peneliti dan perekayasa). Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka perlu disusun strategi yang mencakup apa yang ingin dicapai, langkah-langkah dan tahapan untuk mencapainya, dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian dimaksud.

- b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP belum terkelola dengan baik.

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pada akhir tahun 2015, BPPT telah melakukan perampingan struktur organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan organisasi. Sedangkan beberapa aspek lain masih dirasakan perlu dilanjutkan agar pelayanan prima kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terus meningkat.

Dari hasil penilaian penerapan SAKIP di BPPT pada tahun 2014 oleh Kementerian PAN dan RB kualitas kinerja BPPT berada pada peringkat nilai B. Kualitas ini dirasakan belum maksimal, dan BPPT berkeinginan untuk lebih baik lagi yaitu pada kualitas peringkat BB.

Untuk itu BPPT akan menyusun dan menetapkan sebuah pedoman tentang pelaksanaan SAKIP, beserta sejumlah dokumen berupa petunjuk teknis dari komponen SAKIP. Pedoman ini akan menata perencanaan dan pelaksanaan SAKIP selama lima tahun secara lebih baik. Dan mengatur pembagian tugas para pejabat struktural sesuai tingkatan kinerja dan tanggung jawab.

Selanjutnya guna mewujudkan pelayanan prima bagi pemangku kepentingan dan masyarakat secara efisien dan efektif, masih diperlukan perbaikan yang meliputi:

- (1) Manajemen dan pembinaan kepegawaian belum sepenuhnya mendorong peningkatan SDM yang berkompetensi dalam hal pemahaman dan pelaksanaan SAKIP BPPT guna mempercepat terwujudnya lembaga yang berkinerja dan akuntabel.
- (2) Sistem dan prosedur kerja belum memadai.
- (3) Nilai-nilai etika dan budaya kerja BPPT perlu lebih ditingkatkan.

## BAB 2 VISI , MISI DAN TUJUAN

Sesuai dengan “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005”, BPPT mempunyai tugas “Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPT mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPPT;
- b. Pemantauan, pembinaan dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta dibidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas, serta membina alih teknologi;
- c. Penyelenggaraan pembinaan & pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi & tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan & rumah tangga.

### 2.1 Visi

Berdasarkan tugas dan fungsi, kondisi umum, potensi dan permasalahan yang akan dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I sebelumnya, maka BPPT telah menetapkan visi dan misi BPPT yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPJMN 2015-2019, visi BPPT adalah:

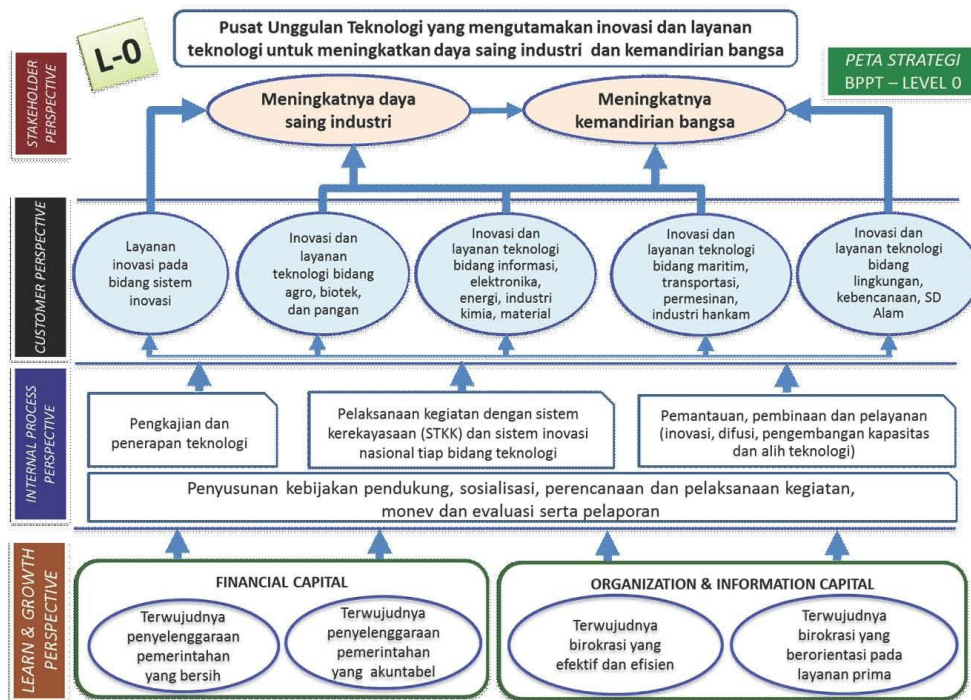
“Pusat Unggulan Teknologi yang Mengutamakan Inovasi  
Dan Layanan Teknologi untuk Meningkatkan Daya Saing  
dan Kemandirian Bangsa”

### 2.2 Misi

Upaya untuk mewujudkan visi BPPT tersebut dilaksanakan melalui enam (6) misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi yang menghasilkan inovasi dan layanan teknologi di bidang kebijakan teknologi.
2. Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi yang menghasilkan inovasi dan layanan teknologi dibidang teknologi pengembangan sumber daya alam.
3. Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi yang menghasilkan inovasi dan layanan teknologi dibidang teknologi agroindustri dan bioteknologi.
4. Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi yang menghasilkan inovasi dan layanan teknologi dibidang teknologi informasi, energi, industri kimia,dan material.
5. Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi yang menghasilkan inovasi dan layanan teknologi dibidang teknologi industri rancang bangun dan rekayasa.
6. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan inovasi dan layanan teknologi.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi, telah dilakukan pemetaan potensi dan permasalahan untuk mengoptimalkan semua peluang dan kesempatan yang ada termasuk juga adanya hambatan atau tantangan yang harus dihadapi. Peta strategi BPPT sebagai hasil pemetaan tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Peta Strategi BPPT 2015 – 2019

2.3 Tujuan dan Indikator

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi BPPT ke dalam program-program yang mendukung pembangunan nasional dan pembangunan bidang yang akan dilaksanakan, maka tujuan BPPT tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan inovasi dan layanan teknologi dalam mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa dengan indikator:
  - a) jumlah Produk yg memiliki Daya Saing;
  - b) jumlah Produk yg mendukung Kemandirian;
  - c) Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung inovasi dan layanan teknologi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

2.4 Kinerja Utama dan Indikator

Tujuan BPPT untuk meningkatkan Inovasi dan Layanan teknologi dalam mendukung peningkatan daya saing dan

kemandirian bangsa, dapat dicapai dengan beberapa tujuan yaitu:

- 1) Terwujudnya inovasi untuk mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa
- 2) Meningkatnya kualitas layanan teknologi BPPT
- 3) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi

Pencapaian tujuan ini diukur dengan beberapa Indikator yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama antara lain:

- 1) jumlah Produk yg memiliki Daya Saing  
adalah jumlah inovasi atau rekomendasi yang digunakan oleh pengguna teknologi/pasar untuk meningkatkan produktivitas dan potensi di industri, daerah, nasional, agar dapat menghasilkan produk/proses yang unik/khas atau lebih murah dan unggul, serta dapat menghasilkan nilai tambah.
- 2) jumlah Produk yg mendukung Kemandirian  
adalah jumlah inovasi atau rekomendasi yang digunakan oleh pengguna teknologi/pasar sehingga meningkatkan kandungan lokal (TKDN), ekspor dan atau substitusi impor dalam rangka menumbuhkan ketahanan dan keamanan nasional untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah/nasional.
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat  
Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknologi BPPT sebagai penyelenggara pelayan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan pengguna teknologi

#### 2.5 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis BPPT Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran lebih detail dari Tujuan BPPT dengan indikator dan target yang terukur. Formulasi keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Strategis BPPT 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis terkait Tujuan 1 adalah:

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya inovasi untuk mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 adalah:

- i. Jumlah Produk yang memiliki Daya Saing
- ii. Jumlah Produk yang mendukung Kemandirian
- iii. Jumlah NSTP/TP yang Berfungsi

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas layanan teknologi BPPT

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 adalah:

- iv. Indeks Kepuasan Masyarakat.
- b. Sasaran Strategis terkait Tujuan 2 adalah:

Sasaran Strategi 3: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 adalah:

- i. Indeks Reformasi Birokrasi,
- ii. Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK, dan
- iii. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja

Secara lebih rinci sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada *Tabel 2.1 Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja*.

Tabel 2.1 Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		IKSS	
T1	Meningkatkan inovasi dan layanan teknologi dalam mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa	SS1	Terwujudnya inovasi untuk mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa	IKSS1	Jumlah Produk yang memiliki Daya Saing
				IKSS2	Jumlah Produk yang mendukung Kemandirian
				IKSS3	Jumlah NSTP/TP yang Berfungsi
		SS2	Terwujudnya layanan teknologi untuk mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa	IKSS 4	Indeks Kepuasan Masyarakat
T2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	SS3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan	IKSS 5	Indeks Reformasi Birokrasi

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		IKSS	
	yang baik untuk mendukung inovasi dan layanan teknologi		yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	IKSS 6	Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK
				IKSS 7	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja



BAB 3  
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,  
KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dalam RPJMN 2015-2019 telah dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawacita. Agenda Prioritas tersebut yaitu: 1). Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2). Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3). Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4). Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5). Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6). Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7). Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8). Melakukan revolusi karakter bangsa. 9). Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan sasaran pokok Pembangunan Nasional yang sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup: 1). Sasaran Makro; 2). Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat; 3). Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan; 4). Sasaran Dimensi Pemerataan; 5). Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah; 6). Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan

yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan.
3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim.
5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.
7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

Sasaran pembangunan Iptek adalah meningkatnya kapasitas iptek yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya hasil penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang mendukung:
  - a. daya saing sektor produksi barang dan jasa;
  - b. keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta
  - c. penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global.
2. Meningkatnya dukungan bagi kegiatan iptek termasuk penyediaan SDM, sarana prasarana, kelembagaan, jaringan.
3. Terbangunnya 100 *Techno Park* di kabupaten/kota, dan *Science Park* di setiap provinsi.

### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional khususnya mengenai peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi *daya saing sektor produksi*, maka pembangunan diarahkan pada:

- 1) Penyelenggaraan Litbang (Riset)

Penyelenggaraan riset difokuskan pada bidang-bidang yang diamanatkan RPJPN 2005-2025 yaitu: (i) pangan dan pertanian; (ii) energi, energi baru dan terbarukan; (iii) kesehatan dan obat; (iv) transportasi; (v)

telekomunikasi, informasi dan komunikasi (TIK); (vi) teknologi pertahanan dan keamanan; dan (vii) material maju.

Strategi pembangunan agar hasil riset mampu mendukung daya saing industri produksi adalah:

- a) Semua kegiatan riset harus menunjukkan kemajuan capaian secara berturut-turut dari mulai dari tahap riset eksplorasi untuk menghasilkan temuan (*invention*), melakukan uji *alpha* untuk temuan baru, kemudian melaksanakan uji *beta*, dan bila berhasil inovasi yang teruji tersebut berlanjut ke tahap difusi yaitu penyebaran penggunaan ke masyarakat;
  - b) Prioritas kegiatan riset adalah kegiatan yang dapat mencapai tahap difusi;
  - c) Kebutuhan di setiap tahapan disediakan secara memadai.
- 2) Layanan Perencanaan dan Teknologi

Secara umum strateginya adalah meningkatkan kapasitas dan pelayanan. Untuk itu akan dilaksanakan peningkatan kapasitas layanan dan revitalisasi peralatan laboratorium serta peningkatan kualitas dan jumlah SDM yang akan dibiayai dari dana pemerintah.

- 3) Penguatan Kerjasama Swasta-Pemerintah-Perguruan Tinggi

Khususnya untuk sektor pertanian dan industri serta pengembangan *entrepreneur* pemula lewat pembangunan inkubator dan modal ventura.

- b. Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam maka pembangunan mencakup antara lain: (a) Sumberdaya Nirhayati dan (b) Mitigasi Perubahan Iklim.
- c. Dalam rangka peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar

Pembangunan iptek diarahkan untuk: (1) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Iptek; (2) pembangunan sarana dan prasarana iptek antara lain revitalisasi Puspiptek; (3)

pembangunan repositori dan disseminasi informasi iptek; serta (4) peningkatan jaringan iptek melalui konsorsium riset.

d. Dalam rangka Taman Tekno dan Taman Sains

Arah kebijakan dan strategi Dalam rangka Taman Tekno dan Taman Sains adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Taman Sains dan Teknologi Nasional (*National Science and Technology Park*) yang diarahkan berfungsi sebagai:
  - a) Pusat pengembangan sains dan teknologi maju;
  - b) Pusat penumbuhan wirausaha baru di bidang teknologi maju;
  - c) Pusat layanan teknologi maju ke masyarakat.
- 2) Pembangunan Taman Sains Provinsi diarahkan berfungsi sebagai:
  - a) penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi;
  - b) penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park;
  - c) sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal.
- 3) Pembangunan Taman Tekno Kabupaten/Kota diarahkan berfungsi sebagai:
  - a) pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen), industri manufaktur, ekonomi kreatif, dan jasa-jasa lainnya yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi;
  - b) tempat pelatihan, pemagangan, pusat diseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas.

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPPT

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis BPPT untuk mendukung arah kebijakan dan

strategi nasional, arah kebijakan BPPT pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengkajian dan penerapan teknologi melalui inovasi dan layanan teknologi untuk mendukung peningkatan daya saing industri melalui :
  - 1) Penyelenggaraan litbangyasa teknologi untuk menghasilkan inovasi dalam bidang teknologi: energi, informasi, elektronika, material, transportasi, maritim, hankam, permesinan, industri kimia, pangan dan pertanian, sistim inovasi untuk pembangunan taman tekno dan sains, dan inkubasi teknologi.
  - 2) Melakukan peningkatan dukungan bagi pelaksanaan pengkajian dan penerapan melalui dukungan infrastruktur laboratorium
  - 3) Berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan Taman Tekno dan Taman Sains.
- b. Mendukung kemandirian bangsa melalui:

Penyelenggaraan litbangyasa teknologi untuk menghasilkan inovasi dalam bidang teknologi: obat dan kesehatan, teknologi sumber daya alam dan kelautan, lingkungan dan kebencanaan.
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung inovasi dan layanan teknologi  
Strategi pelaksanaan dari arah kebijakan tersebut diatas dilakukan melalui:
  - a. Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi melalui 3 (tiga) program utama yaitu:
    - 1) Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi (PPT),
    - 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT,
    - 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT.
  - b. Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi melalui pembedaan teknologi yang ada di BPPT
  - c. Melaksanakan kegiatan dengan pemanfaatan Sistem Inovasi Nasional

- d. Melaksanakan kegiatan dengan sistem tata kerja kerekayasaan (STTK)

### 3.3 Kerangka Regulasi

Untuk menumbuh kembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan kemampuan untuk melakukan sinergi perkembangan kelembagaan (organisasi dan institusi - serangkaian adat kebiasaan yang umum, prosedur standar atau rutin, regulasi atau hukum yang mengatur hubungan dan interaksi antara individu, kelompok dan organisasi) dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dengan berbagai faktor lain secara bersistem.

Faktor pertama adalah kemampuan menumbuhkan jaringan antara unsur-unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membentuk rantai yang mengaitkan kemampuan melakukan pembaruan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kemampuan memanfaatkan kemajuan yang terjadi ke dalam barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis. Melalui jaringan itu terjadi berbagai bentuk transaksi sehingga sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi mengalir dari unsur kelembagaan yang satu ke unsur kelembagaan yang lain. Dengan demikian, sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif.

Faktor kedua adalah kemampuan menumbuhkan iklim usaha yang kompetitif, sehingga persaingan antar pelaku ekonomi tidak hanya ditentukan oleh penguasaan pasar atau sumber daya alam saja, namun lebih ditentukan oleh kemampuan inovatif dalam menghasilkan produk barang dan jasa yang bermutu serta bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhnya iklim seperti itu menimbulkan tarikan bagi kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan untuk terus mencari terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menghasilkan berbagai invensi yang tidak saja memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga memberi peluang baru bagi pelaku ekonomi untuk mengembangkan berbagai inovasi yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Faktor ketiga adalah kemampuan menumbuhkan daya dukung. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya

tergantung pada para pelaku yang terlibat langsung. Dukungan pihak-pihak lain sangat diperlukan, terutama dukungan yang berkaitan dengan pengembangan profesionalisme, pengalokasian sumber daya, pembentukan kepastian usaha, penyelenggaraan aliran permodalan, pemberdayaan standarisasi, serta penentuan persyaratan dan pengawasan, baik untuk melindungi kepentingan kehidupan manusia maupun untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sinergi perkembangan kelembagaan dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ketiga faktor itulah yang membentuk lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanannya kedalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan peran dalam pembangunan nasional, Indonesia harus mampu secara sistematis mengembangkan serta memadukan unsur-unsur kelembagaan dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki ke dalam jaringan yang membentuk jalinan hubungan yang saling memperkuat, saling mengisi, dan saling mengendalikan dalam suatu keseluruhan yang utuh sehingga semua potensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif ke arah yang diinginkan.

Berdasarkan perspektif di atas, kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah terkait secara timbal balik dengan kebijakan di bidang ekonomi dan kemasyarakatan, yang secara keseluruhan merupakan kebijakan nasional yang terpadu dan saling memperkuat.

Beberapa kebutuhan regulasi yang diperlukan oleh BPPT dalam meningkatkan perannya sebagai infrastruktur iptek nasional dalam kemandirian dan daya saing bangsa dapat dilihat pada Tabel 3.1. Matrik Kerangka Regulasi.

Tabel 3.1. Matrik Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Institusi Terkait
I.	UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian		
	Peraturan Pemerintah (PP) tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (ps. 9 ayat (5))	Sebagai faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan arah pengkajian dan penerapan teknologi BPPT	Kementerian Perindustrian
	Perpres tentang Kebijakan Industri Nasional (ps. 12)	Sebagai faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan arah pengkajian dan penerapan teknologi BPPT	Kementerian Perindustrian
	PP tentang Perwilayahan Industri dan Kawasan Industri (ps.14)	Meningkatkan kebutuhan produk inovasi teknologi dan layanan teknologi BPPT - peningkatan daya saing Industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah dan peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai.	Kementerian Perindustrian
	PP tentang Sumber Daya Manusia Industri (ps. 17)	Meningkatkan kebutuhan inkubator teknologi, <i>technopreneur</i> teknologi dan akreditasi Balai BPPT	Kementerian Perindustrian
	Permen Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Wirausaha Industri, Pembina Industri Dan Penyediaan Konsultan Industri (ps. 21 & 24)	Meningkatkan kebutuhan produk inovasi teknologi dan layanan teknologi BPPT - kebutuhan akan Inkubator teknologi dan Technopreneur teknologi dan akreditasi Balai BPPT	Kementerian Perindustrian
	Permen Tentang Perusahaan Industri Tertentu Dan Perusahaan Kawasan Industri Yang Wajib Melakukan Manajemen Energi Dan Manajemen Air (ps. 34,35).	Meningkatkan kebutuhan produk inovasi teknologi dan layanan teknologi BPPT	Kementerian Perindustrian
	Perpres tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci (ps. 39)	Meningkatkan layanan teknologi BPPT - Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci wajib melakukan alih teknologi kepada pihak domestik.	Kementerian Perindustrian
	Permen Tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Penelitian Dan Pengembangan, Kontrak Penelitian Dan Pengembangan, Usaha Bersama, Pengalihan Hak Melalui Lisensi, Dan/Atau Akuisisi	Meningkatkan kebutuhan layanan audit teknologi BPPT	Kementerian Perindustrian

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Institusi Terkait
	Teknologi Serta Audit Teknologi Industri (ps. 38, 40, 41)		
	PP tentang Sumber Daya Alam Untuk Industri Dalam Negeri (ps. 30)	Peningkatan kebutuhan layanan teknologi BPPT untuk perusahaan Industri dalam perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah	Kementerian Perindustrian
	PP tentang Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri (ps. 40)	Penjaminan risiko atas pemanfaatan Teknologi Industri produk BPPT oleh perusahaan industri	Kementerian Perindustrian
	Permen Tentang Penetapan Kondisi Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Industri Dalam Negeri Dan/Atau Pembangunan Industri Pionir (ps. 47)	Meningkatkan kebutuhan produk inovasi teknologi dan layanan teknologi BPPT - Industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional	Kementerian Perindustrian
	PP tentang Standardisasi Industri (ps. 50,60,61)	Meningkatkan kebutuhan layanan teknologi BPPT	Kementerian Perindustrian
	PP tentang Bentuk Fasilitas dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Nonfiskal (ps. 111)	Meningkatkan kebutuhan produk inovasi teknologi dan layanan teknologi BPPT	Kementerian Perindustrian
	PP tentang Industri Hijau (ps. 80)	Meningkatkan kebutuhan produk inovasi teknologi dan layanan teknologi BPPT	Kementerian Perindustrian
	PP tentang Industri Strategis (ps. 84)	Meningkatkan kebutuhan produk inovasi teknologi dan layanan teknologi BPPT	Kementerian Perindustrian
	PP tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (ps. 90)	Meningkatkan kebutuhan produk inovasi teknologi dan layanan teknologi BPPT	Kementerian Perindustrian



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Institusi Terkait
II	UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara		
	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian di Dalam Negeri	Meningkatkan kebutuhan produk inovasi layanan teknologi BPPT	Kementerian ESDM
III	UU Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan		
	Peraturan Pemerintah tentang Industri Pertahanan (ps. 10)	Meningkatkan kebutuhan produk inovasi layanan teknologi BPPT	Kementerian Pertahanan
	Rencana induk Industri Pertahanan jangka panjang (ps. 21)	Meningkatkan kebutuhan produk inovasi teknologi dan layanan teknologi bidang pertahanan BPPT	Kementerian Pertahanan
	Penelitian dan Pengembangan serta Perekayasaan (ps. 28)	Peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi Industri Pertahanan dilakukan melalui penelitian dan pengembangan serta perekayasaan dalam suatu sistem nasional	Kementerian Pertahanan
	Peraturan Pemerintah Sumber Daya Manusia (ps. 36)	Meningkatkan kerja sama antarsemua unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan jaringan informasi, ilmu pengetahuan pertahanan dan keamanan, serta teknologi Industri Pertahanan	Kementerian Pertahanan
	Peraturan Presiden Kegiatan Produksi Industri Pertahanan (ps. 38)	Dalam kegiatan produksi Industri Pertahanan wajib mengutamakan penggunaan bahan mentah, bahan baku, dan komponen dalam negeri.	Kementerian Pertahanan
	Peraturan Pemerintah imbal dagang Industri Pertahanan (ps. 43)	Kewajiban Alih Teknologi	Kementerian Pertahanan
	Kerja Sama Dalam Negeri Penyelenggaraan Industri Pertahanan (pendidikan, pelatihan, alih teknologi, penelitian dan pengembangan, perekayasaan, produksi, pemasaran, dan pembiayaan) – ps. 46	Kerja sama meliputi pendidikan, pelatihan, alih teknologi, penelitian dan pengembangan, perekayasaan, produksi, pemasaran, dan pembiayaan	Kementerian Pertahanan

#### 3.4 Kerangka Kelembagaan

Penyesuaian Kerangka kelembagaan BPPT (struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan SDM) yang digunakan untuk melaksanakan Rencana Strategis BPPT 2015 – 2019 mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

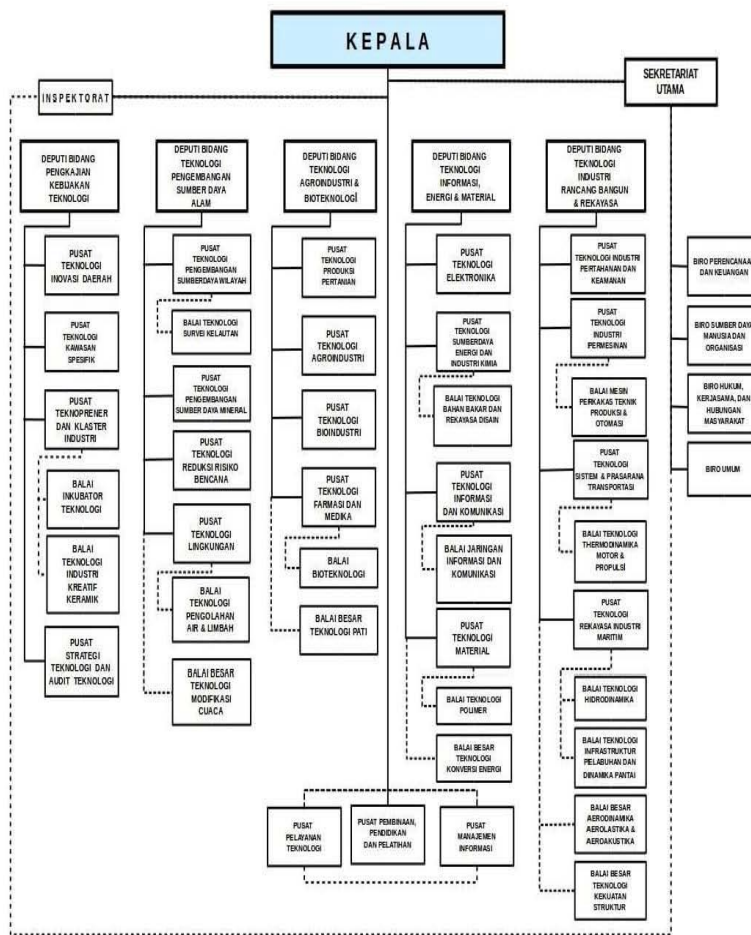
- a. Meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan yang terdapat dalam RPJMN 2015-2019, sesuai dengan fungsi dan visi/misi BPPT;
- b. Mempertajam arah kebijakan dan strategi BPPT sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya BPPT;
- c. Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi BPPT dalam melaksanakan program-program pembangunan nasional;
- d. Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas SDM BPPT.

Struktur organisasi BPPT merupakan kerangka dalam pola tetap hubungan diantara fungsi-fungsi, unit-unit, atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam satu organisasi BPPT. Struktur organisasi BPPT mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Spesialisasi kegiatan, yaitu berkenaan dengan spesifikasi tugas-tugas dalam organisasi BPPT;
- b. Standardisasi kegiatan, yaitu prosedur-prosedur yang digunakan untuk menjamin terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan;
- c. Koordinasi kegiatan, yaitu menunjukkan prosedur-prosedur yang mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan kerja dalam organisasi BPPT;
- d. Ukuran satuan kerja yang menunjukkan level eselonisasi suatu unit kerja.

Struktur organisasi BPPT berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor: 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi digambarkan pada berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BPPT



Gambar 3.1 Struktur Organisasi BPPT (sumber: Perka BPPT No.009 Tahun 2015)

## BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1 Target Kinerja

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 serta sesuai dengan tugas dan fungsi, maka BPPT berkontribusi dalam pembangunan nasional dibidang Iptek melalui inovasi dan layanan teknologi.

Target kinerja BPPT yang menjadi capaian untuk visi dan misi disesuaikan dengan tingkatan masing-masing entitas. Padat tingkat Lembaga sasaran menggambarkan dampak (impact) dan hasil (outcome) yang direpresentasikan dengan Indikator Kinerja Utama BPPT dan atau indikator kinerja lain yang relevan.

Pada tingkat Eselon I atau Kedeputian, maka sasaran menggambarkan hasil (outcome) pada bidangnya yang direpresentasikan dengan Indikator Kinerja Utama Eselon I (Indikator Kinerja Program) dan indikator kinerja lain yang relevan.

Sedangkan pada tingkat Eselon II atau Unit Kerja/Satker, maka sasaran menggambarkan keluaran (output) pada bidangnya yang direpresentasikan dengan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan.

Mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dan strategi maka dalam penganggaran dilaksanakan melalui 3 program yaitu :

- A. Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi (PPT);
- B. Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT;
- C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT.

Tabel 4.1. Target Kinerja BPPT 2015-2019

Tujuan :								
T1.	Meningkatkan inovasi dan layanan teknologi dalam mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa.							
Sasaran Strategis	IKSS	Satuan	Target <sup>a)</sup>					
			2015	2016	2017	2018	2019	
SS 1	Terwujudnya inovasi untuk mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa	jumlah Produk yang memiliki Daya Saing	Produk	1	3	0	1	6
		jumlah Produk yang mendukung Kemandirian	Produk	3	2	6	12	10
		Jumlah NSTP/TP yang Berfungsi	NSTP/TP	0	0	0	0	3
SS 2	Meningkatnya kualitas layanan teknologi BPPT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	B	B	B	B	A
T2.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung inovasi dan layanan teknologi.							
SS 3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai RB	B	BB	BB	BB	A
		Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Nilai LAKIP	B	BB	BB	BB	BB

Sasaran Strategis BPPT Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran lebih detail dari Tujuan BPPT dengan indikator dan target yang terukur. Formulasi keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Strategis BPPT 2015-2019 adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis terkait Tujuan 1 adalah:

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya inovasi untuk mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa.

Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja

1. Jumlah Produk yang memiliki Daya Saing sebanyak 11 produk terdiri dari:

1) Inovasi yang dihasilkan berjumlah 11 merupakan kontribusi dari 4 kelompok teknologi sebagai berikut:

a) Kelompok Kebijakan Teknologi

1 inovasi Lembaga Sertifikasi Auditor Teknologi yang akan dihasilkan pada tahun 2018

b) Kelompok Teknologi Rancang Bangun dan Rekayasa

i. 1 inovasi produk drone wulung yang akan dihasilkan pada tahun 2016

ii. 1 inovasi produk drone alap-alap yang akan dihasilkan pada tahun 2019

c) Kelompok Teknologi Informasi Energi dan Material

i. 1 inovasi E-Voting untuk layanan pemilu yang dihasilkan pada tahun 2015

ii. 1 inovasi sistim elektronika navigasi untuk meningkatkan keselamatan transportasi udara yang akan dihasilkan pada tahun 2016

iii. 1 inovasi E-services berbasis identifikasi dan/atau sertifikat elektronik yang akan dihasilkan pada tahun 2016

iv. 1 inovasi pengembangan sistim elektronika navigasi untuk meningkatkan keselamatan transportasi laut pada tahun 2019

v. 1 inovasi E-services berbasis Cloud yang

akan dihasilkan pada tahun 2019

- vi. 1 inovasi konvergensi elektromedika yang akan dihasilkan pada tahun 2019
  - vii. 1 inovasi Smart Grid yang akan dihasilkan pada tahun 2019
  - viii. 1 inovasi e-Pemilu yang akan dihasilkan pada tahun 2019
2. jumlah Produk yang mendukung kemandirian sebanyak 33 produk terdiri atas:
- 1) Inovasi yang dihasilkan berjumlah 28 merupakan kontribusi dari 4 kelompok teknologi sebagai berikut :
    - a) kelompok Sumber Daya alam
      - i. 1 Inovasi Teknologi Air Bersih, air payau menjadi air bersih dengan integrasi desalinasi dan solar system yang dihasilkan pada tahun 2015,
      - ii. 1 Inovasi Teknologi Air Bersih, pengolahan air bersih dengan teknologi ultra filtrasi untuk sekolah yang dihasilkan pada tahun 2016
      - iii. 1 Inovasi Teknologi Air Bersih, air lahan gambut menjadi air bersih dengan teknologi micro bubble yang dihasilkan pada tahun 2017
      - iv. 1 inovasi Teknologi pengolahan Emas bebas mercury dan penanganan dampaknya untuk pertambangan emas skala kecil (PESK) yang dihasilkan pada tahun 2018
      - v. 1 inovasi Teknologi Modifikasi Cuaca untuk kesiapan paket layanan teknologi mitigasi bencana hydrometrology yang akan dihasilkan pada tahun 2019
      - vi. 1 inovasi Sistem dan Teknologi Reduksi Risiko Bencana Longsor untuk kesiapan paket layanan teknologi mitigasi bencana

- hydrometrology yang akan dihasilkan pada tahun 2019
- vii. 1 inovasi Teknologi pemetaan lahan gambut skala detail yang dihasilkan pada tahun 2019
- b) kelompok Teknologi Informasi Energi dan Material:
- i. 1 inovasi PLTP CT 3 MW dengan TKDN maksimal yang akan dihasilkan pada tahun 2017
  - ii. 1 inovasi material biocompatible SS 316 L untuk implant tulang yang di hasilkan pada tahun 2017
  - iii. 1 inovasi teknologi SRF yang akan dihasilkan pada tahun 2018
  - iv. 1 inovasi Rubber Air Bag yang akan dihasilkan pada tahun 2018
  - v. 1 inovasi PLTP BC 500 KW dengan TKDN maksimal yang akan dihasilkan pada tahun 2018
  - vi. 1 inovasi Teknologi Re-Tread Ban Pesawat Twin Otter yang akan dihasilkan tahun 2019
  - vii. 1 inovasi teknologi PLT Biogas yang akan dihasilkan pada tahun 2019
- c) kelompok kelompok Teknologi Agroindustri dan Bio teknologi
- i. 1 Paten komersial Inovasi teknologi produksi garam farmasi yang dimanfaatkan industri yang dihasilkan pada tahun 2015
  - ii. 1 inovasi teknologi/lisensi paten produksi enzim protease (penurunan pemakaian enzim impor sebesar 10% ) yang akan dihasilkan pada tahun 2016
  - iii. 1 Inovasi teknologi produksi pangan non beras berbahan baku ubi kayu dan



- jagung yang akan dihasilkan pada tahun 2017
- iv. 1 Inovasi teknologi produksi Biopeat yang akan dihasilkan pada tahun 2017
  - v. 1 inovasi teknologi/lisensi paten produksi enzim xilanase, penurunan pemakaian enzim impor sebesar 10% ) yang akan dihasilkan pada tahun 2018
  - vi. 1 Inovasi pengembangan teknologi produksi Biopeat yang akan dihasilkan pada tahun 2018
  - vii. 1 Inovasi teknologi produksi pangan non beras berbahan baku sagu yang akan dihasilkan pada tahun 2018
  - viii. 1 Inovasi teknologi /patent komersial Bio Organik yang akan dihasilkan pada tahun 2018
  - ix. 1 Inovasi teknologi produksi pakan ternak Ruminansia yang akan dihasilkan pada tahun 2018
  - x. 1 Inovasi teknologi pemeliharaan dan perbaikan Induk Ikan Nila Maharsi yang akan dihasilkan pada tahun 2018
  - xi. 1 Inovasi teknologi produksi Mie Sorghum Jagung yang akan dihasilkan pada tahun 2019
  - xii. 1 Inovasi teknologi produksi Mie Sorghum Sagu yang akan dihasilkan pada tahun 2019
  - xiii. 1 Inovasi pengembangan teknologi produksi pakan ternak Ruminansia yang akan dihasilkan pada tahun 2019
  - xiv. 1 Inovasi teknologi produksi Dextrose Mono Hydrate (DMH) yang akan dihasilkan pada tahun 2019
- 2) Rekomendasi yang dihasilkan sebanyak 5 rekomendasi, merupakan kontribusi dari

- kelompok Teknologi Rancang Bangun dan Rekayasa
- i. 1 rekomendasi teknis pembangunan train V Pupuk Kaltim yang dihasilkan pada tahun 2015
  - ii.1 rekomandasi DED standard pabrik gula yang akan dihasilkan pada tahun 2017
  - iii.1 rekomendasi Disain Standar Kapal Cepat Rudal yang akan dihasilkan pada tahun 2018
  - iv.1 rekomendasi Pilot Project Sistem Transportasi Perkotaan yang akan dihasilkan pada tahun 2018
  - v.1 rekomendasi Disain Standar Kapal Niaga yang akan dihasilkan pada tahun 2019
- 3) Jumlah NSTP/TP yang berfungsi berjumlah 3 NSTP/TP yang merupakan kontribusi dari kelompok teknologi sebagai berikut:
- a) kelompok Kebijakan Teknologi,
    - i. 1 percontohan kawasan Techno Park Cimahi yang akan dihasilkan pada tahun 2019
    - ii. 1 percontohan kawasan National Science Techno Park BIT – Puspiptek Serpong yang akan dihasilkan pada tahun 2019
  - b) Kelompok Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi ,
    - i. 1 percontohan kawasan Techno Park Bantaeng, Sulawesi Selatan yang akan dihasilkan pada tahun 2019

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas layanan teknologi BPPT

Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja

1. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil survai kepuasan pengguna teknologi yang dilayani oleh BPPT dari 5 kelompok teknologi ditargetkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah B untuk tahun 2015-2018,

sedangkan pada tahun 2019 ditargetkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah A

Merupakan kontribusi dari 5 kelompok teknologi sebagai berikut :

- 1) kelompok Sumber Daya alam
- 2) kelompok Teknologi Rancang Bangun dan Rekayasa
- 3) kelompok Teknologi Informasi Energi dan Material
- 4) kelompok Teknologi Agroindustri dan Bio teknologi
- 5) kelompok Pengkajian Kebijakan Teknologi

b. Sasaran Strategis terkait Tujuan 2 adalah:

Sasaran Strategi 3: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi.

Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai minimal BB.
- 2) Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK dengan nilai WTP, dan
- 3) evaluasi akuntabilitas kinerja dengan nilai minimal BB

#### 4.2 Kerangka Pendanaan

Pendanaan dari APBN difokuskan untuk mendukung daya saing sektor produksi, kelestarian dan peningkatan kemanfaatan sumber daya alam, penyiapan masyarakat menghadapi kehidupan global serta penguatan SDM serta peningkatan sarana dan prasarana IPTEK.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPPT diperlukan kaidah pelaksanaan yang tertata dengan baik dan bersinergi antara

satu dengan lainnya yang meliputi kerangka pendanaan, regulasi, kelembagaan dan evaluasi. Kerangka pendanaan ditujukan untuk mempertajam alokasi anggaran agar efektif dan efisien. Melalui mekanisme penyusunan kerangka pendanaan yang dilaksanakan yaitu dengan mempertimbangkan kegiatan dan anggaran tahun sebelumnya, yang kemudian direview khususnya pada keberlanjutan program terhadap agenda pembangunan dengan melakukan perbaikan-perbaikan pada output/keluaran serta komponen-komponen dibawahnya. Dengan mempertimbangkan lingkungan strategis dan capaian pada visi dan misi maka dilakukan review baseline yang meliputi alokasi program, kegiatan dan output serta komponen yang berlanjut maupun yang baru; volume target pada masing-masing tingkatan serta evaluasi terhadap output yang sudah tercapai menjadi hasil/outcome.

Perhitungan pada KPJM yang melalui perhitungan khususnya di tahun 2015 yang sudah dilakukan di awal tahun baik untuk biaya operasional maupun non operasional dengan dasar mempertimbangkan hasil kegiatan dan evaluasinya terhadap capaian kinerja yang sudah ditetapkan. Adapun perhitungannya yaitu dengan mempertimbangkan alokasi dari masing-masing program, yang merupakan kompilasi alokasi per kegiatan sebagai implikasi adanya anggaran di masing-masing output, sedangkan untuk tingkat komponen merupakan hasil perhitungan volume komponen dikalikan dengan satuan biaya dan inflasinya.

Alokasi baseline BPPT untuk 5 tahun kedepan sesuai dengan capaian visi dan misi dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia guna menjawab kebutuhan dan tantangan dilakukan melalui penyusunan skala prioritas anggaran. Alokasi anggaran yang efektif menjadi faktor penting dalam mewujudkan sasaran prioritas pembangunan. Dalam mendukung hal tersebut, alokasi anggaran difokuskan pada program dan kegiatan yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas nasional untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, efisiensi dari belanja terkait operasional akan terus didorong sehingga alokasi yang terbatas menjadi lebih berdayaguna. Alokasi belanja pada prioritas didukung dengan rencana konkret yang berorientasi pada hasil dan manfaat (outcome

dan impact). Dalam kaitan ini perencanaan program dan kegiatan pembangunan menjadi salah satu kunci keberhasilan dari penajaman alokasi pada prioritas tersebut. Rencana yang konkret tersebut bukan saja pada kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas nasional melalui inovasi dan layanan teknologi.

Pendanaan Program dan Kegiatan BPPT pada RPJMN 2015-2019 dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian bangsa, peningkatan daya saing dan pelayanan publik dapat di ringkaskan pada tabel di bawah.

Meningkatkan kebutuhan produk inovasi teknologi dan layanan teknologi BPPT.

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	RPJM III (2015-2019)				
		2015	2016	2017	2018	2019
081.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT	373,40	432,56	497,05	534,33	574,41
	Pelayanan Internal untuk mendukung inovasi dan layanan teknologi unit teknis	373,40	432,46	497,05	534,33	574,41
081.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara	65,50	100,00	182,78	196,49	211,23
	Pengadaan dan Peningkatan fasilitas Laboratoria BPPT	65,50	100,00	182,78	196,49	211,23
081.06	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	517,30	506,56	695,41	661,58	710,31
	Inovasi dan Layanan Teknologi bidang Agroindustri dan Bioteknologi	68,10	74,90	97,75	112,08	113,77
	Inovasi dan Layanan Teknologi bidang Informasi, Energi dan Material	100,10	93,90	163,49	190,88	185,88
	Inovasi dan Layanan Teknologi bidang Industri Rancang Bangun dan Rekayasa	105,30	130,50	163,88	133,69	103,74
	Inovasi dan Layanan Teknologi bidang Pengembangan Sumberdaya Alam	114,00	105,80	140,87	160,16	164,18
	Inovasi dan Layanan Teknologi bidang Sistem Inovasi	73,80	41,20	61,28	64,77	64,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	RPJM III (2015-2019)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Pelayanan Eksternal untuk mendukung inovasi dan layanan teknologi unit teknis	56,00	60,10	68,14	73,25	78,74
	Jumlah	956,20	977,09	1.375,24	1.392,40	1.495,95

BAB 5  
PENUTUP

Renstra BPPT revisi 4 ini dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja). Selanjutnya Renja-BPPT disusun dengan berpedoman pada Renstra, dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif.

Program dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional dan prioritas bidang akan diutamakan selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPT. Adapun keberhasilan atas pelaksanaan Renstra, program dan kegiatan, diukur melalui realisasi/capaian kinerja program, kegiatan dan anggaran, secara berkala yaitu periode triwulan dan tahun.

Renstra ini selanjutnya akan menjadi salah satu bahan dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), laporan akuntabilitas dan evaluasi SAKIP.

Pemantauan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra, program dan kegiatan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku termasuk pedoman pelaksanaan SAKIP BPPT yang ditetapkan.

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN  
PENERAPAN TEKNOLOGI,

UNGGUL PRIYANTO

## ANAK LAMPIRAN 1

Matriks Kinerja dan Pendanaan BPPT 2015-2019  
Matrik KEGIATAN DAN PENDANAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA  
KEMENTERIAN/LEMBAGA : (081) BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

SASARAN STRATEGI	IKSS	SATUAN	TARGET					ANGGARAN					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
SS 1	Terwujudnya inovasi untuk mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa	Jumlah Produk yang memiliki daya saing	Produk	1	3	0	1	6	-	44.260	-	-	57.235	
		Jumlah produk yang mendukung kemandirian	Produk	3	2	6	12	10	1.815	1.369	40.784	49.400	51.323	
		Jumlah NSTP/TP yang berfungsi	NSTP/TP	0	0	0	0	3	-	-	-	-	2.500	
SS 2	Meningkatnya kualitas layanan teknologi BPPT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	B	B	B	B	A	4.000	5.000	7.500	10.000	11.500	
SS 3	Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai RB	B	BB	BB	BB	A						
		Opini penilaian laporan keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
		Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Nilai LAKIP	B	BB	BB	BB	BB						

## 1.1 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BPPT

SASARAN PROGRAM	IKP	SATUAN	TARGET					ANGGARAN					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
SP 1.1	Terwujudnya produk di bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi (PKT) yang memiliki daya saing	Jumlah Produk di bidang PKT yang memiliki Daya Saing	Produk				1					749		PKT
SP 1.2	Termanfaatkannya hasil inovasi/rekomendasi di Bidang PKT yang memiliki daya saing	Jumlah rekomendasi bidang PKT yang memiliki daya saing dan sudah dimanfaatkan.	Rekomendasi	2	3	3	2	2				1.583	1.583	
SP 1.3	Terwujudnya produk di bidang PKT untuk mendukung kemandirian bangsa	Jumlah produk bidang PKT yang mendukung kemandirian bangsa dan sudah dimanfaatkan	Produk	-	-	-	-	-						
SP 1.4	Termanfaatkannya hasil inovasi/rekomendasi di bidang PKT untuk mendukung kemandirian bangsa	Jumlah rekomendasi bidang PKT mendukung kemandirian bangsa dan sudah dimanfaatkan.	Rekomendasi	-	-	-	10	10				4.128	4.128	
SP 1.5	Berfungsinya Kawasan TP/NSTP Bidang PKT yang memiliki DS	Jumlah TP/NSTP yang berfungsi	NSTP/TP					2					6000	
		Jumlah kawasan TP/NSTP yang terwujud	NSTP/TP			1	1	-			6.000	6.000		
SP 1.6	Terwujudnya Pusat Inovasi Bidang PKT yg memiliki Daya Saing	Jumlah Rintisan TP	RTP					2					1500	
SP 1.7	Meningkatnya Kualitas Layanan bidang PKT	Indeks kepuasan masyarakat	IKM	B	B	B	B	A				78.485	78.485	
SP 2.1	Terwujudnya Inovasi di Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam (TPSA) untuk Mendukung Kemandirian Bangsa	Jumlah Produk di Bidang TPSA yang Mendukung Kemandirian Bangsa	Produk	1	1	1	1	3			2.500	3.400	49.167	TPSA
SP 2.2	Termanfaatkannya hasil inovasi di Bidang TPSA yang mendukung kemandirian	Jumlah inovasi di Bidang TPSA yang mendukung kemandirian dan sudah dimanfaatkan	Inovasi	-	-	1	1	5			72.333	70.000	73.306	



SASARAN PROGRAM	IKP	SATUAN	TARGET					ANGGARAN					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
SP 2.3	Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi TP5A	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	B	B	B	B	A			24.432	30.350	31.200	
SP 3.1	Termanfaatkannya hasil inovasi di bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi (TAB) yang memiliki Daya Saing	Jumlah Inovasi Bidang TAB yang memiliki Daya Saing dan sudah dimanfaatkan oleh pengguna teknologi	Inovasi	1	1	1	1	1	2.045	449	500	1.000		TAB
SP 3.2	Terwujudnya inovasi di bidang TAB untuk mendukung kemandirian bangsa	Jumlah Produk Bidang TAB yang mendukung kemandirian	Produk	1	1	2	6	4	1.369	1.950	18.750	20.900		
SP 3.3	Termanfaatkannya hasil inovasi di bidang TAB untuk mendukung kemandirian bangsa	Jumlah Inovasi yang mendukung kemandirian di Bidang TAB yang sudah dimanfaatkan	Inovasi	0	3	11	4	21	2.369	12.050	9.500	45.900		
SP 3.4	Berfungsinya NSTP/TP Bidang TAB yang memiliki Daya Saing	Jumlah NSTP/TP yang berfungsi	TP					1					2.500	
SP 3.5	Terwujudnya Rintisan TP Bidang TAB yg memiliki DS	Jumlah Rintisan Tekno Park (RTP)	RTP					1					8.500	
SP 3.6	Meningkatnya kualitas layanan TAB	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	B	B	B	B	A						
SP 4.1	Terwujudnya inovasi di bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material (TIEM) yang memiliki daya saing	Jumlah Produk bidang TIEM yg memiliki Daya Saing	Produk	1	2			5		22.000			49.500	TIEM
SP 4.2	Termanfaatkannya hasil inovasi di Bidang TIEM yang memiliki DS	Jumlah inovasi Bidang TIEM yang memiliki DS dan sudah dimanfaatkan oleh pengguna teknologi	Inovasi			1	5			100.000	82.500			
SP 4.3	Terwujudnya inovasi di bidang TIEM untuk mendukung kemandirian bangsa	Jumlah Produk Bidang TIEM yang mendukung Kemandirian	Produk			2	3	2		58.550	58.150	43.250		

SASARAN PROGRAM	IKP	SATUAN	TARGET					ANGGARAN					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
SP 4.4	Termanfaatkannya hasil inovasi di bidang TIEM untuk mendukung kemandirian bangsa	Jumlah inovasi yg mendukung Kemandirian di Bidang TIEM dan sudah dimanfaatkan	Inovasi	1	5	6	5	2		13.150				
SP 4.5	Terwujudnya Rintisan TP Bidang TIEM yg memiliki DS	Jumlah Rintisan Tekno Park (RTP)	RTP					1	9.600	9.000	5.000	5.000		
SP 4.6	Meningkatnya kualitas layanan TIEM	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	B	B	B	B	A						
SP 5.3	Terwujudnya inovasi di bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekeyasa (TIRBR) untuk mendukung kemandirian bangsa	Jumlah Produk Bidang TIRBR yang mendukung Kemandirian	Produk			1	2	1		334	2.250	5.950		TIRBR
SP 5.4	Termanfaatkannya hasil inovasi di Bidang TIRBR untuk mendukung kemandirian	Jumlah Inovasi /rekomendasi Bidang TIRBR yang sudah dimanfaatkan oleh pengguna teknologi	Inovasi		1	2	2	2	1.253	1.600	8.200	13.950		
SP 5.5	Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi TIRBR	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	B	B	B	B	A	3	5	7	9	10	
SP 6	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan BPPT (kesesuaian dengan SAI dan SAP)	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	9,33	13,03	14,68	15,82	17,12	
		Nilai evaluasi pelaksanaan SAKIP	Nilai SAKIP	B	BB	BB	BB	BB	4,35	4,85	5,13	5,54	6,15	
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai RB	B	BB	BB	BB	BB	0,80	0,80	3,00	3,50	4,00	
		Indeks kepuasan masyarakat	Nilai IKM	B	B	B	B	A	5,66	10,76	15,08	16,39	17,63	
		Peringkat hasil evaluasi keterbukaan informasi publik	Peringkat	-	10 Besar	8 Besar	6 Besar	5 Besar	6,03	6,03	9,50	10,00	11,50	

SASARAN PROGRAM	IKP	SATUAN	TARGET					ANGGARAN					KET
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	<i>Peringkat hasil Nilai pelayanan e-gov (PEGI)</i>	Peringkat	-	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	0,95	0,95	1,90	2,00	2,10	

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi / PTKSSI (XXXX)							12.843,98	3.258,46	14.000	24.000	23.000	PTKSSI	
SK 1	Terwujudnya Inovasi Pembangunan Daerah Cerdas (Smart Region) yang mendukung daya saing bangsa (3476)						1.894	536	1.000	3.000	3.000		
	<i>Jumlah Panduan Pengembangan Daerah Cerdas (Smart Region)</i>	Rekomendasi	1	1	1	1	1	696					
	<i>Jumlah Panduan Pengembangan Budaya Inovasi (Desa Inovatif)</i>	Rekomendasi	1	1	1	1	1	591	268				
	<i>Jumlah Rekomendasi tentang Pengukuran dan Perencanaan Strategis Sistem Inovasi Daerah</i>	Rekomendasi	1	1	1	1	1	607	269	500	2.000	3.000	
	<i>Jumlah Pembangunan Ruang Publik Kreatif</i>	Prototipe	-	-	1	1	-	-	-	500	1.000	-	
SK 2	Terwujudnya Pusat Inovasi/Iptekin di Kota Pekalongan yang mendukung daya saing bangsa (3476)						0	622	3.000	5.000	5.000		
	<i>Jumlah rekomendasi pembangunan kawasan Techno Park Pekalongan</i>	Rekomendasi		2	5	5	5	0	622	3.000	5.000	5.000	
SK 3	Terwujudnya Inovasi dan layanan teknologi Techno Park di Kabupaten Pelalawan (3474)						10.950	1.277	4.000	5.000	4.000		
	<i>Jumlah rekomendasi pembangunan kawasan Techno Park Pelalawan</i>	Rekomendasi	2	2	1	1	1	10.950	1.277	4.000	5.000	4.000	
SK 4	Terwujudnya Inovasi dan layanan teknologi kawasan spesifik berbasis						-	823	1.000	1.500	1.500		

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	IPTEKIN (3474)								823	1.000	1.500	1.500	
SK 5	Terwujudnya Inovasi dan layanan teknologi Techno Park di Cimahi (3475)									2.000	2.500	2.500	
	<i>Jumlah rekomendasi pembangunan kawasan Techno Park Cimahi</i>	Rekomendasi	10	12	12	11	11			1.000	1.200	1.200	
	<i>Jumlah tenant (UKM) yang dilayani oleh Pusat Inovasi Teknopark Cimahi</i>	PPBT	10	12	7	7	7			1.000	1.300	1.300	
SK 6	Terwujudnya Inovasi dan layanan teknologi NSTP Puspiptek (3475)									3.000	5.000	5.000	
	<i>Jumlah Rekomendasi Pengembangan Kawasan NSTP Puspiptek</i>	Rekomendasi	7	4	1	5	5			3.000	5.000	5.000	
	<i>Jumlah Perusahaan Inovatif yang dihasilkan di Pusat Inovasi Universitas</i>	PPBT	-	4	-	-	-						
	<i>Jumlah Fasilitas Pendampingan bisnis Inovatif</i>	Paket Saprasi	-	-	1	1	1						
SK 7	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Teknopreneur dan Kluster Industri (3475)										2.000	2.000	
	<i>Jumlah Pengkajian Kebijakan Teknopreneur</i>	Rekomendasi				1	1				500	500	
	<i>Jumlah Pengkajian Kebijakan Kluster Industri di Industri dan di Daerah</i>	Rekomendasi				1	1				1.500	1.500	
Pengkajian Teknologi Industri Proses dan Energi / PPIPE (XXXX)											2.500	2.500	PIPE
SK 1	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Teknologi Sektor Industri Proses										500	500	
	<i>Jumlah Rekomendasi Teknologi Kesehatan (Outlook)</i>	Rekomendasi	-	-	1	1	1				500	500	

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET			
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
(3478)	Jumlah Rekomendasi Teknologi Pangan (Outlook)	Rekomendasi	-	1	1	1	1			500	500	500				
SK 2 Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Teknologi Sektor Industri Energi (5864)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Energi (Outlook)	Rekomendasi	1	1	1	1	1	500	500	500	500	500				
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan TKDN Sektor Kelistrikan	Rekomendasi	-	-	-	1	1	500	500	500	500	500				
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan TKDN Sektor Migas	Rekomendasi	-	1	-	1	1				500	500				
<b>Pengkajian Teknologi Industri Manufaktur, Telematika dan Elektronika / PIMTE (XXXX)</b>													500	500	<b>PIMTE</b>	
SK 1 Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Teknologi Sektor Industri Manufaktur (5867)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan TKDN Sektor Transportasi	Rekomendasi				1	1				500	500				
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan TKDN Sektor Maritim	Rekomendasi				1	1				500	500				
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan TKDN Infrastruktur	Rekomendasi				1	1				500	500				
SK 2 Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Teknologi Sektor Telematika	Jumlah Rekomendasi Kebijakan TKDN Information & Communication Technology (ICT)	Rekomendasi				1	1				500	500				
SK 3 Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Teknologi Sektor Elektronika	Jumlah Rekomendasi Elektronika (Outlook)	Rekomendasi				1	1				500	500				
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan TKDN Sektor Industri Elektronika	Rekomendasi					1				500	500				
<b>Pengkajian dan Penerapan Sistem Audit Teknologi (3515)</b>											-	658	1.382	1.800	2.100	<b>PSTAT</b>
SK 1 Terwujudnya Pembinaan dan Sertifikasi Kompetensi Auditor Teknologi								-	358	750	300	300				
	Jumlah Rekomendasi Valuasi Teknologi (sektor)	Rekomendasi	-	-	1	1	-			177	300	300				

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET			
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
	Jumlah Rekomendasi Strategi Teknologi (sektor)	Rekomendasi	1	1	-	-	-		358							
	Jumlah Rekomendasi Skenario Pemicu Pertumbuhan Industri (sektor)	Rekomendasi	-	-	1	1	1			573						
	Jumlah Rekomendasi Sertifikasi Auditor Teknologi	Rekomendasi	-	-	-	1	1				700	700				
SK 2 Tersedianya Referensi Teknis Sistem Audit Teknologi								-	300	632	1.500	1.800				
	Jumlah Referensi Teknis Standar Audit Teknologi	Referensi Teknis	1	1	1				300							
	Jumlah Referensi Teknis Kelembagaan Audit Teknologi (LSP, TUK, LDP)	Referensi Teknis			1	1	1			286	750	700				
	Jumlah Referensi Teknis Panduan Audit (Sektor)	Referensi Teknis					1					750				
	Jumlah Referensi Teknis Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Pengukuran TKT	Referensi Teknis			1	1				346	400					
	Jumlah Referensi Teknis Sistem Pengukuran TKT	Referensi Teknis				1	1					350	350			
<b>Penerapan dan Pelayanan Inkubasi Teknologi (3463)</b>											4.200	1.990	1.000	7.500	8.000	<b>BIT</b>
SK 1 Terwujudnya Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang Berdaya Saing								2.200	1.000	500	4.000	4.500				
	Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dihasilkan	PPBT	5	3	2	5	5									
SK 2 Terwujudnya Inovasi dan Layanan Teknologi/ Inkubasi Bisnis Berbasis								1.000	490	200	1.500	1.500				

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Teknologi	<i>Jumlah calon tenant yang diinkubasi</i>	Tenant	10	10	8	10	10							
SK 3	Tersedianya Skema Pembiayaan untuk bisnis inovatif							1.000	500	300	2.000	2.000		
	<i>Jumlah Skema Pembiayaan untuk bisnis inovatif yang tersedia</i>	Rekomendasi	5	3	2	2	2	1.000	500	300	2.000	2.000		
SK 4	Terlaksananya Layanan jasa inkubasi teknologi (PNBP)	Layanan Teknologi	1	1	1	1	1		100	100	100	100		
<b>Penerapan dan Pelayanan Teknologi Industri Kreatif Keramik (3514)</b>								<b>1.800</b>	<b>2.200</b>	<b>17.300</b>	<b>12.500</b>		<b>BTIKK</b>	
SK 1	Terlaksananya Pelayanan dalam hal Teknologi Bahan Baku, Desain dan Proses Produksi Industri Kreatif Keramik serta Revitalisasi Peralatan Laboratorium dan Workshop													
	<i>Jumlah PPBT atau UKM Inovatif</i>	Unit Usaha		1					200	300	300	300		
	<i>Jumlah Inovasi Bahan</i>	Inovasi		1	1				500	600	700	700		
	<i>Jumlah Inovasi Desain</i>	Inovasi		1	1				200	300	300	300		
	<i>Jumlah Prototype Alat</i>	Prototipe		1					500	500	500	600		
	<i>Jumlah Revitalisasi Peralatan Laboratorium Industri Kreatif Keramik</i>					1	1				15.000	10.000		
SK 2	Terlaksananya Pengembangan Strategi Pemasaran Industri Kreatif Keramik serta Penguatan Kelembagaan													
	<i>Jumlah Pelaksanaan Temu Bisnis dan Pameran</i>	Paket		1					200	200				
	<i>Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu</i>	Paket				1					200			
	<i>Akreditasi Laboratorium Pengujian</i>	Paket					1						300	

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
SK 3	Terlaksananya Layanan jasa keramik kreatif (PNBP)	Layanan Teknologi	1	1	1	1	1		200	300	300	300	
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Sumber Daya Mineral (3508)</b>							<b>6.217</b>	<b>3.604</b>	<b>2.500</b>	<b>8.400</b>	<b>8.000</b>		<b>PTPSM</b>
SK 1	Terwujudnya Inovasi teknologi pengolahan dan pemurnian mineral nikel												
	<i>Jumlah Desain Proses Teknologi Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel</i>	Desain	1	-	-	-	-						
	<i>Jumlah Prototipe Produk Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel</i>	Prototipe	-	1	-	-	-						
	<i>Jumlah Prototipe Teknologi Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel</i>	Prototipe	-	-	1	-	-			1.460			
	<i>Jumlah Pilot Plant Teknologi Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel</i>	Pilot Plant	-	-	-	1	1				5.000	5.000	
SK 2	Terwujudnya Inovasi teknologi pengolahan emas bebas merkuri dan pengelolaan dampaknya pada pertambangan emas skala kecil (PESK)												
	<i>Jumlah Desain Proses Teknologi Pengolahan Emas pada Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)</i>	Desain	1	-	-	-	-						
	<i>Jumlah Prototipe Teknologi Pengolahan Emas pada Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)</i>	Prototipe	-	1	-	-	-						
	<i>Jumlah Pilot Plant Teknologi Pengolahan Emas dan Pengelolaannya pada Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)</i>	Pilot Plant	-	-	1	-	-			1.040			
	<i>Jumlah Pilot Project Teknologi Pengolahan Emas dan Pengelolaannya pada Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)</i>	Pilot Project	-	-	-	1	1				3.400	3.000	

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah (3493)</b>							<b>2.950</b>	<b>4.692</b>	<b>2.500</b>	<b>8.700</b>	<b>7.200</b>	<b>PTPSW</b>	
SK 1	Terwujudnya Inovasi teknologi eksplorasi sumber daya wilayah lahan gambut	Jumlah Referensi teknis pemetaan lahan gambut skala detail	Referensi Teknis	-	-	1	-	-			2.500		
		Jumlah Prototipe Peta Lahan Gambut Skala Detail	Prototipe	-	-	-	1	-				8.700	
		Jumlah Pilot Project Pemetaan Lahan Gambut Skala Detail	Pilot Project	-	-	-	-	1					7.200
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Reduksi Risiko Bencana (3507)</b>							<b>4.760</b>	<b>2.649</b>	<b>1.900</b>	<b>6.325</b>	<b>7.273</b>	<b>PTRRB</b>	
SK 1	Terwujudnya Inovasi Sistem dan Teknologi Reduksi Risiko Bencana Longsor	Jumlah Desain Sistem dan Teknologi Reduksi Risiko Bencana Longsor	Desain	-	1	-	-	-					
		Jumlah Prototipe Sistem dan Teknologi Reduksi Risiko Bencana Longsor	Prototipe	-	-	1	-	-			1.125		
		Jumlah Pilot Plant Sistem dan Teknologi Reduksi Risiko Bencana Longsor	Pilot Plant	-	-	-	1					3.450	
		Jumlah Pilot Project Sistem dan Teknologi Reduksi Risiko Bencana Longsor	Pilot Project	-	-	-	-	1					3.967
SK 2	Terwujudnya Inovasi Sistem dan Teknologi Monitoring Kekuatan Gedung Bertingkat Terhadap Bencana Gempa Bumi	Jumlah Desain Sistem Dan Teknologi Monitoring Kekuatan Gedung Bertingkat Terhadap Bencana Gempa Bumi	Desain	-	1	-	-	-					
		Jumlah Prototipe Sistem Dan Teknologi Monitoring Kekuatan Gedung Bertingkat Terhadap Bencana Gempa Bumi	Prototipe	-	-	1	-	-			775		

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Jumlah Pilot Plant Sistem Dan Teknologi Monitoring Kekuatan Gedung Bertingkat Terhadap Bencana Gempa Bumi	Pilot Plant	-	-	-	1	-				2.875	
		Jumlah Pilot Project Sistem Dan Teknologi Monitoring Kekuatan Gedung Bertingkat Terhadap Bencana Gempa Bumi	Pilot Project	-	-	-	-	1					3.306
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan (3500)</b>							<b>2.123</b>	<b>3.752</b>	<b>5.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>PTL</b>	
SK 1	Terwujudnya Inovasi Teknologi Pengelolaan Sampah, dan Limbah Padat Perkotaan	Jumlah Prototipe Teknologi Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat Perkotaan	Prototipe	-	-	1	-	-			1.500		
		Jumlah Pilot Plant Teknologi Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat Perkotaan	Pilot Plant	-	-	-	1	-				6.000	
		Jumlah Pilot Project Teknologi Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat Perkotaan	Pilot Project	-	-	-	-	1					5.000
SK 2	Terwujudnya Inovasi Teknologi Pengolahan Air Bersih untuk Masyarakat	Jumlah Pilot Plant Teknologi Pengolahan Air Bersih untuk Masyarakat di Lingkungan Air Gambut (Technology Micro Buble)	Pilot Plant	-	-	1	-	-			2.500		
		Jumlah Pilot Project Teknologi Pengolahan Air Bersih untuk Masyarakat di Lingkungan Air Payau dengan Integrasi Desalinasi dan Salar System (2015), Sekolah dengan Teknologi Ultra Filtrasi dan Reverse Osmosis(2016)),	Pilot Project	1	1	-	1	1				2.000	3.000

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<i>Masyarakat Terdampak banjir dan Air Limbah (2018-2019)</i>													
SK 3	Terwujudnya Inovasi Teknologi Pemantauan Lingkungan Perkotaan	<i>Jumlah Pilot Plant Teknologi Pemantauan Kualitas Lingkungan Air</i>	Pilot Plant	-	-	1	-	-			1.500			
		<i>Jumlah Pilot Project Teknologi Pemantauan Kualitas Lingkungan Udara dan Integrasi Lingkungan Air dan Udara</i>	Pilot Project	-	-	-	1	1				2.000	2.000	
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (3512)</b>														
				51.526	42.271	37.064	110.000	65.250						<b>BBTMC</b>
SK 1	Terlaksananya Layanan jasa teknologi modifikasi cuaca (PNBP)	<i>Jumlah Layanan Jasa Teknologi Modifikasi Cuaca</i>	Layanan Teknologi	2	2	2	2	2			14.399	18.200	19.000	
		<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	Indeks IKM	B	B	B	B	A						
SK 2	Terwujudnya inovasi Teknologi dan Armada untuk penanganan bencana hidrometeorologi di Provinsi Rawan Bencana	<i>Jumlah Desain Teknologi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Banjir dan Kekeringan</i>	Desain	1	-	-	-	-						
		<i>Jumlah Prototipe Teknologi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Banjir</i>	Prototipe	-	1	-	-	-						
		<i>Jumlah Desain Teknologi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Karhutla</i>	Desain	-	-	1	-	-			440			

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<i>Jumlah Prototipe Teknologi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Karhutla</i>	Prototipe	-	-	-	1						650		
	<i>Jumlah Referensi Teknis Hasil Observasi Cuaca untuk Mitigasi Banjir, Karhutla, Kekeringan</i>	Referensi Teknis	-	1	1	1	1			513	900	1.000		
	<i>Jumlah Prototipe Wahana Raket TMC</i>	Prototipe			1	1	1			1.662	2.000	3.000		
	<i>Jumlah Revitalisasi Armada Penjinak Bencana Hidrometeorologi</i>	Jasa Operasi	-	-	1	1	1			13.885	80.000	34.000		
SK 3	Terlaksananya Layanan Perkantoran	<i>Jumlah Layanan Belanja Pegawai</i>	Bulan	12	12	12	12			4.765	6.250	6.250		
		<i>Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Kantor</i>	Bulan	12	12	12	12			1.400	2.000	2.000		
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Survei Kelautan (3473)</b>														
				40.097	24.889	89.317	90.565	80.690						<b>BTSK</b>
SK 1	Terwujudnya Inovasi dan Layanan Teknologi Eksplorasi Sumberdaya Kelautan	<i>Jumlah Teknologi seismik 2D untuk mendukung eksplorasi migas</i>	Desain	1	-	-	-	-						
		<i>Jumlah Teknologi seismik 2D untuk mendukung eksplorasi migas</i>	Prototipe	-	1	-	-	-						
		<i>Jumlah Teknologi seismik 2D untuk mendukung eksplorasi migas</i>	Pilot Project	-	-	1	1	-			2.551	4.000	5.000	
		<i>Jumlah Teknologi survey dan observasi kelautan</i>	Prototipe	-	-	1	1	1			1.667	2.000	3.000	
		<i>Jumlah Referensi Teknis Kawasan NSTP Maritim Kab. PPU</i>	Referensi Teknis	-	-	1	1	1			500	1.000	2.000	

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	<i>Revitalisasi Kapal Riset Barunajaya dan Peralatan Survey Kelautan</i>	Survey	-	-	1	1	1			68.115	64.000	50.000	
SK 2	Terlaksananya Layanan Teknologi Survey Kelautan	Jumlah Layanan Teknologi Survey Kelautan	Layanan	2	2	2	2	2		9.939	12.000	12.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	B	B	B	B	A					
SK 3	Terlaksananya Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Belanja Pegawai	Bulan	12	12	12	12	12		5.595	6.155	6.770	
		Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12		950	1.410	1.920	
<b>Penerapan Teknologi Pengolahan Air dan Limbah (3470)</b>								<b>6.520</b>	<b>3.350</b>	<b>2.778</b>	<b>3.470</b>	<b>3.690</b>	<b>BTPAL</b>
SK 1	Terlaksananya Layanan Jasa Teknologi Pengolahan Air dan Limbah (PNBP)	Jumlah Layanan Jasa Teknologi Pengolahan Air dan Limbah	Layanan Teknologi	-	1	1	1	1		380	94	150	200
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks IKM	B	B	B	B	A					
SK 2	Terlaksananya Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Belanja Pegawai	Bulan	12	12	12	12	12		2.970	2.684	3.320	3.490
		Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12					
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Farmasi dan Medika (3482)</b>								<b>7.072</b>	<b>5.950</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>PTFM</b>	
SK 1	Terwujudnya Inovasi teknologi produksi bahan baku obat dengan sintesa dan purifikasi								1.815	3.165	2.900	5.500	5.500
		Jumlah prototipe Dextrose Mono Hydrate (DMH) dan Sefotaksim sebagai bahan baku obat	Prototipe	2	2	2			1.815	1.428	1.200	2.000	2.000
		Jumlah pilot plant produksi Dextrose Mono Hydrate (DMH) dan Sefotaksim sebagai bahan baku obat	Pilot Plant				2	1		1.737	1.700	3.000	3.000
		Jumlah paten komersial produksi Dextrose Mono Hydrate (DMH)	Paten					1				500	500

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	<i>sebagai bahan baku obat</i>												
SK 2	Terwujudnya inovasi teknologi produksi bahan baku obat herbal								2.790	1.329	1.500	4.000	4.500
		Jumlah prototipe bahan baku obat dengan ekstraksi (antikoalesterol, fitoestrogen, antidiabetes, immunosurveilans, immunomodulator)	Prototipe	2	3	2	2	2	2.790	1.329	900	2.000	2.500
		Jumlah alih teknologi bahan baku obat dengan ekstraksi	Prototipe	1	1	1	1	1			600	2.000	2.000
SK 3	Terwujudnya Inovasi teknologi produksi bahan baku obat Biofarmasetika								1.300	2.578	1.550	6.000	6.000
		Jumlah prototipe bahan baku obat dengan bioteknologi (stem cell, kit diagnostik, vaksin)	Prototipe	1	2	2	2	2	1.300	2.578	1.550	6.000	6.000
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Agroindustri (3478)</b>													<b>PTA</b>
SK 1	Terwujudnya Inovasi Teknologi Peningkatan Daya Saing Agroindustri								1.308	1.603	1.450	6.500	7.500
		Jumlah Prototipe Produk turunan Sawit	Produk	-	1	-	1						
		Jumlah Alih Teknologi Produk turunan Sawit	Alih Teknologi			1		1	1.308	836	850	4.000	4.000
		Jumlah perusahaan yang memanfaatkan hasil inovasi teknologi produksi turunan sawit	Desain				1	1					
		Jumlah paket kajian teknologi pasca panen hortikultura (mangga)	Kajian		1					767	600	2.500	3.500
		Jumlah paket konsep desain teknologi pasca panen	Konsep			1							

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<i>hortikultura (mangga)</i>													
	<i>Jumlah prototipe skala pilot teknologi pasca panen hortikultura (mangga)</i>	Kajian				1								
	<i>Jumlah alih teknologi teknologi peningkatan masa kesegaran buah tropis</i>	Alih Teknologi						1						
SK 2	Terwujudnya Inovasi Teknologi Industri Pengolahan Pangan								6.247	3.283	2.200	5.250	6.000	
	<i>Jumlah prototipe pangan berbasis sagu</i>	Produk		1	1	1	-							
	<i>Jumlah perusahaan yang memanfaatkan hasil inovasi teknologi produksi pangan berbasis sagu</i>	Perusahaan			1	1	1	3.632	1.365	900	2.000	2.000		
	<i>Jumlah prototipe formula pangan fungsional</i>	Produk		1	1	1	1	1.500	681	700	1.500	2.000		
	<i>Jumlah prototipe hasil pengolahan rumput laut</i>	Produk		1	1	-	1							
	<i>Jumlah alih teknologi pengolahan rumput laut</i>	Alih Teknologi	1	1	1	1	1	1.115	1.237	600	1.750	2.000		
	<i>Jumlah perusahaan yang memanfaatkan hasil inovasi teknologi pengolahan rumput laut</i>	Perusahaan		1	1	1	1							
Sk 3	Terwujudnya Kawasan Technopark Grobogan								-	1.719	1.350	3.000	2.500	
	<i>Jumlah unit usaha berbadan hukum (PPBT)</i>	PPBT		1	1	1	1	3.196	1.719	1.350	3.000	2.500		

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<i>Jumlah prototipe inovasi teknologi pengolahan pangan lokal (P)</i>	Produk		1		1								
	<i>Jumlah SOP pengelolaan techno park dan sistim kelembagaan &amp; kemitraan (R)</i>	SOP				1	1							
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Produksi Pertanian (3503)</b>							<b>3.712</b>	<b>10.545</b>	<b>5.999</b>	<b>9.500</b>	<b>9.300</b>		<b>PTPP</b>	
SK 1	Terwujudnya Inovasi Teknologi Produksi Pakan Ternak Ruminansia pada Sistem Integrasi	<b>Total anggaran</b>						-	-	1.850	3.000	4.100		
	<i>Jumlah prototipe pakan komplet berbasis limbah sawit : Prototipe Alpha Pakan komplet</i>	Prototipe	1											
	<i>Jumlah prototipe pakan komplet berbasis limbah sawit : Prototipe Beta Pakan komplet untuk Masa Pertumbuhan (Grower)</i>	Prototipe		1										
	<i>Jumlah prototipe pakan komplet berbasis limbah sawit : Prototipe Beta Pakan komplet untuk Penggemukkan</i>	Prototipe			1					600				
	<i>Jumlah prototipe pakan komplet berbasis limbah sawit : Prototipe Beta Pakan komplet untuk pembibitan</i>	Prototipe				1					750			
	<i>Jumlah prototipe Alpha Pakan Probiotik spesifik sawit</i>	Prototipe			1					300				
	<i>Jumlah prototipe Beta Pakan Probiotik spesifik sawit</i>	Prototipe				1						500		



SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Terwujudnya Produk bidang Transportasi yg mendukung kemandirian bangsa	Prototipe			1				300				
	Jumlah prototipe Beta Pakan Suplemen	Prototipe				1	1				400	500	
	Jumlah prototipe Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Peternakan "SI-Pinter Farm recording" untuk Ruminansia	Prototipe	-	-	1				200				
	Jumlah prototipe Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Peternakan "SI-Pinter Farm recording" untuk ternak perah	Prototipe	-	-		1					200		
	Jumlah prototipe Aplikasi Formulasi Pakan Ternak Ruminansia Prototipe Alpha "SI-Pandai"	Prototipe			1				200				
	Jumlah prototipe Aplikasi Formulasi Pakan Ternak Ruminansia Prototipe Beta "SI-Pandai"	Prototipe				1					200		
	Jumlah prototipe Aplikasi Formulasi Pakan Ternak Ruminansia Prototipe Beta "SI-Pandai" untuk Ternak Perah	Prototipe					1						200
	Jumlah rekomendasi Desain Teknologi Pengembalaan terkontrol	Rekomendasi	-	-	-	-	1						1.000
	Jumlah Prototipe alpha pakan hijauan sumber protein pada lahan marginal	Prototipe			1				250				

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Prototipe Beta pakan hijauan sumber protein pada lahan marginal	Prototipe				1						500	
	Jumlah Rekomendasi Pakan hijauan sumber protein	Rekomendasi					1						500
	Jumlah prototipe Alpha teknologi perbanyakan HMT	Prototipe				1					450		
	Jumlah prototipe Beta teknologi perbanyakan HMT	Prototipe					1					400	
	Jumlah rekomendasi Desain Teknologi Smart Farming Peternakan di Prumpung	Rekomendasi	-	-	-	-	1						1.000
	Rekomendasi Kajian Gen-gen Potensial pada tanaman kelapa sawit	Rekomendasi	-	1	-	-	-						
	Jumlah rekomendasi Peningkatan Produktivitas Hijauan Makanan Ternak (HMT) pada lahan sub optimal (UMKM)	Rekomendasi			-	-	1						500
SK 2	Terwujudnya Inovasi Teknologi Produksi Benih Udang Galah Monosex Jantan Melalui Teknologi Neofemale								1.300	1.300	2.500	2.700	
	Jumlah prototipe udang galahmonosex jantan : prototipe dsRNA MriAG	Prototipe	-	1	-	-	-		900				
	Jumlah prototipe udang galahmonosex jantan : prototipe benih Udang Galah Hibrida	Prototipe	-	-	1	-	-			800			
	Jumlah prototipe udang galahmonosex jantan prototipe : benih Udang Galah Neo-female	Prototipe	-	-	-	1						1.700	

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<i>Jumlah prototype udang galahmonosex jantan : prototipe benih Udang Galah Monosex jantan</i>	Prototipe	-	-	-	-	1						2.700	
	<i>Jumlah Alih Teknologi produksi ikan nila Salina</i>	Alih Teknologi	-	1	-	-	-		400					
	<i>Jumlah Alih Teknologi produksi ikan Maharsi</i>	Alih Teknologi	-	-	1	-	-			500				
	<i>Jumlah rekomendasi pemeliharaan dan perbaikan kualitas induk ikan nila salina</i>	Rekomendasi	-	-	-	1	-				800			
SK 3	Terlaksananya Inovasi dan Layanan Teknologi Peningkatan Daya Saing Industri Kakao Unggulan								3712	2045	0	0	0	
	<i>Jumlah Prototipe biopestisida berbahan baku <u>Beauveria bassiana</u></i>	Prototipe	-	1	-	-	-		295					
	<i>Jumlah Prototipe biopestisida <u>Trichoderma</u> sp.</i>	Prototipe	1	-	-	-	-	2000						
	<i>Jumlah Rekomendasi Penerapan Good Agricultural Practices (GAP)</i>	Rekomendasi	-	1	-	-	-		300					
	<i>Jumlah Teknologi Bibit Stimulant grafting kakao (Mulako)</i>	Prototipe	-	1	-	-	-		500					
	<i>Jumlah Alih Teknologi Pasca Panen</i>	Alih Teknologi		1	-	-	-		300					
	<i>Jumlah Prototype produk antara kakao</i>	Prototipe	1	-	-	-	-	1712						
	<i>Jumlah Prototype produk hilir kakao</i>	Prototipe	-	1	-	-	-		450					
	<i>Jumlah Prototype bibit unggul tanaman karet</i>	Prototipe	-	1	-	-	-		200					

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
SK 4	Terwujudnya Inovasi dan layanan teknologi techno park di Kab. Bantaeng							0	7.200	2.849	4.000	2.500		
	<i>Jumlah Unit Usaha berbadan hukum berbasis teknologi yang dihasilkan</i>	PPBT	-	2	3	5	5		2.200	600	500	500		
	<i>Jumlah Penerima Manfaat Teknologi</i>	Orang	-	50	100	100	100		5.000	1.800	3.000	1.000		
	<i>Jumlah Rekomendasi Kajian Teknologi Perlabatan Masa Dormansi Bibit</i>	Rekomendasi	-	-	-	1	-				500			
	<i>Jumlah Rekomendasi dimanfaatkannya varietas jagung hibrida PTPP-BPPT untuk di kembangkan</i>	Rekomendasi	-	-	-	-	1					1.000		
	<i>Jumlah Produk Inovasi E commerce pemasaran benih di Technopark</i>	Produk Inovasi	-	-	1	-	-			449				
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bioindustri (3480)</b>							<b>2.248</b>	<b>2.122</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>		<b>PTB</b>	
SK 1	Termanfaatkannya inovasi teknologi produksi pupuk dan pestisida hayati							1.320	1.369	1.750	3.500	4.500		
	<i>Jumlah prototipe pupuk dan pestisida hayati</i>	Prototipe	1	1			1	1.320	1.369	1.000	1.000	2.000		
	<i>Jumlah paten komersial pupuk dan pestisida hayati</i>	Paten Komersial			1	1	1			750	2.500	2.500		
SK 2	Termanfaatkannya Inovasi Teknologi enzim sebagai substitusi impor							928	753	2.250	4.500	4.500		
	<i>Jumlah penurunan pemakaian enzim impor pada perusahaan terpilih pengguna enzim</i>	Persentase			10					1.000				
	<i>Jumlah prototipe enzim</i>	Prototipe	1					928						

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	<i>Jumlah paten komersial</i>	Paten Komersial		1	1	1	1		753	1.250	4.500	4.500	
<b>Pengkajian dan Penerapan Bioteknologi (3465)</b>													<b>B Biotek</b>
SK 1	Terwujudnya Inovasi dan Layanan Teknologi Bioteknologi							1.423	-	-	-	-	
	<i>Jumlah prototype produksi bahan aktif secara fermentatif untuk kesehatan</i>	Prototipe	1					1.423	-	-	-	-	
SK 2	Terwujudnya inovasi teknologi produksi pembibitan hortikultura							-	-	24.250	4.000	4.500	
	<i>Jumlah prototype pengembangan klon dan propagasi tanaman hortikultura</i>	Prototipe		6				-	-	22.500	1.500	1.750	
	<i>Jumlah pengembangan kawasan wisata agro</i>	Kawasan		1				-	-	1.750	2.500	2.750	
	<i>Jumlah Revitalisasi Peralatan Laboratorium Bioteknologi</i>				1	1					25.000	20.000	
SK 3	Terwujudnya Inovasi Bioteknologi untuk pengembangan bahan baku obat							-	-	1.500	3.500	3.500	
	<i>Jumlah prototype bahan baku obat anti malaria dan anti amuba</i>	Prototipe		1	1	1		-	-	500	1.000	1.000	
	<i>Jumlah Prototype obat sefalosporin dan turunannya</i>	Prototipe		1	1	1		-	-	1.000	2.500	2.500	
SK 4	Terlaksananya Layanan Jasa Bioteknologi (PNBP)							3.336	5.453	2.991	3.630	4.000	
	<i>Jumlah layanan jasa Bioteknologi</i>	Layanan Teknologi	1	1	1	1	1	3.336	3.353	1.491	1.930	2.100	
	<i>Jumlah Layanan Teknologi Pembibitan melalui Kultur Jaringan In Vitro dan Ex Vitro</i>	Layanan		1	1	1	1		2.100	1.500	1.700	1.900	
SK 5	Terlaksananya Layanan Perkantoran										12.885		

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	<i>Jumlah bulan layanan perkantoran</i>	Bulan Layanan	12	12	12	12	12		9.494	9.688	9.449	12.885	14.370
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pati (3460)</b>													<b>BZTP</b>
SK 1	Terwujudnya Inovasi teknologi pati termodifikasi sebagai bahan baku aneka produk pangan yang aman dan bergizi							-	1.115	1.700	9.000	4.000	
	<i>Jumlah prototype inovasi teknologi pati</i>	Prototipe	1	1	1		1		800	1.200	5.500	2.100	
	<i>Jumlah Front Engineering Design teknologi pati</i>	Desain		1	1	1			315	500	1.500		
	<i>Jumlah advokasi</i>	Advokasi				1	1			-	2.000	1.900	
	<i>Jumlah Revitalisasi Peralatan Laboratorium Pati</i>					1	1				20.000	15.000	
SK 2	Terwujud dan Berfungsinya Pusat Inovasi di kabupaten Lampung Tengah							-	4.100	3.000	6.000	6.000	
	<i>Jumlah usaha berbadan hukum yang dilayani di Pusat Inovasi kabupaten Lampung Tengah</i>	Perusahaan	1	1	1	1	1		3.000	3.000	3.000	3.000	
	<i>Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)</i>	PPBT	-	-	-	1	1				3.000	3.000	
	<i>Jumlah Difusi Teknologi</i>	Difusi		1	-	-	-		1.100				
SK 3	Terlaksananya Layanan Jasa Teknologi Pati							-	1.458	1.800	2.900	3.500	
	<i>Jumlah kerja sama Penerapan teknologi budidaya</i>	Kerjasama	1	1	1	1	1		1.458	800	1.700	2.100	

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	<i>Jumlah perusahaan yang memanfaatkan hasil inovasi teknologi pati sebagai bahan baku produk pangan yang aman dan bergizi</i>	Perusahaan	-	-	1	-	1			1.000	1.200	1.400	
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Elektronika (5867)</b>							-	5.330	58.700	46.500	23.500	<b>PTE</b>	
SK 1	Terwujudnya Inovasi Konvergensi Teknologi Elektronika dan Telekomunikasi Sistem Elektromedika	<i>Jumlah prototipe konvergensi komunikasi elektromedika</i> <i>Jumlah pengujian (pra-klinis &amp; klinis) prototipe konvergensi komunikasi elektromedika</i> <i>Jumlah akreditasi lab pengujian elektromedika</i>	Prototipe Pengujian Akreditasi		1		2		1	2.630	20.500	18.500	10.000
SK 2	Terwujudnya Inovasi Sistem Elektronika Navigasi untuk Keselamatan Transportasi	<i>Jumlah prototipe elektronika navigasi (ground movement &amp; laut)</i> <i>Jumlah pengujian lapangan prototipe elektronika navigasi (ground movement &amp; laut)</i> <i>Jumlah pendampingan sertifikasi elektronika navigasi (ground movement &amp; laut)</i> <i>Jumlah pendampingan pengajuan paket sertifikasi ADS-B ke kemenhub oleh PT INTI</i> <i>Jumlah akreditasi lab pengujian elektronika</i> <i>Jumlah Revitalisasi Peralatan Laboratorium Elektronika</i>	Prototipe Pengujian Konsultasi Konsultasi Akreditasi		2		2	2	1	1.700	37.200	27.000	12.500
						1						35.000	40.000

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
SK 3	Terwujudnya Standar kualitas mutu produk dan jasa TIK	<i>Jumlah pengajuan perluasan ruang lingkup akreditasi laboratorium teknologi elektronika</i>	Dok Akreditasi		1					1.000	1.000	1.000	1.000
SK 4	Peralatan dan Mesin Penunjang Riset	<i>Jumlah peralatan dan mesin penunjang riset teknologi elektronika</i>	Paket Peralatan		1							37.000	29.500
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (3481)</b>							-	7.100	17.000	37.000	29.500	<b>PTIK</b>	
SK 1	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Elektronik Untuk e-Services (e-Government & e-Business)	<i>Jumlah invensi e-services berbasis KTP-el multi guna</i> <i>Jumlah invensi dalam aplikasi e-Services berbasis cloud computing</i> <i>Jumlah invensi dalam Prototipe multi modal bio-metrik</i> <i>Jumlah invensi teknologi bahasa yang siap digunakan</i> <i>Jumlah invensi teknologi keamanan TIK / cyber security</i> <i>Jumlah layanan teknologi sistem informasi dan komunikasi</i> <i>Jumlah Revitalisasi Peralatan Laboratorium Informasi dan Komunikasi</i>	Paket teknologi Paket teknologi Paket Teknologi Paket Teknologi Paket Teknologi Layanan Teknologi Paket Peralatan		1	1	1	1		2.700	4.000	4.500	4.500
SK 2	Terwujudnya penggunaan bersama infrastruktur data senter untuk cloud computing dan certificate authority	<i>Jumlah pengguna hasil inovasi teknologi infrastruktur TIK khususnya IT security</i>	Produk	4	4	4	4	4		2.600	6.000	5.000	3.000
SK 3	Terwujudnya penggunaan inovasi teknologi intelligent computing untuk human information processing	<i>Jumlah inovasi teknologi intelligent computing yang digunakan oleh instansi</i>	Produk		1			1		1.800	7.000	2.500	2.000

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<i>pemerintah/industri/ akademisi</i>													
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Konversi Energi (5864)</b>							<b>25.600</b>	<b>12.800</b>	<b>41.300</b>	<b>29.750</b>	<b>10.750</b>	<b>B2TKE</b>		
SK 1	Terwujudnya Inovasi teknologi Pembangkit Listrik tenaga Panas Bumi (PLTP) Skala kecil	<i>Jumlah pilot plant PLTP Skala kecil yang beroperasi</i>	Pilot Plant	1	1			17.100	2.000	5.000	1.000			
		<i>Jumlah rancang bangun PLTP Skala Kecil</i>	Disain				1							
SK 2	Terwujudnya Kawasan Techno Park Energi (Baron Techno Park)	<i>Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Baron Techno Park</i>	Paket Teknologi	1	1			7.000	9.000	3.500	5.000	5.000		
		<i>Jumlah Pelatihan IPTEK EBT di Baron</i>	Paket Pelatihan	1	1	1	1							
		<i>Jumlah Layanan Kunjungan Edukasi Techno Park EBT Baron</i>	Layanan	1000	1000	1000	1000							
SK3	Terwujudnya Inovasi Teknologi Konservasi dan Audit Energi	<i>Jumlah Desain Teknologi Kogenerasi untuk Industri</i>	Desain	1							750	750		
SK 4	Terwujudnya Inovasi teknologi smart grid	<i>Jumlah desain SCADA Smart Grid di Kawasan PUSPIPTEK</i>	Disain	1	1	1		1.500	1.800	32.800	23.000	5.000		
		<i>Jumlah Revitalisasi Peralatan Laboratorium Konversi Energi</i>	Paket Peralatan			1	1				50.000	50.000		
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengembangan Teknologi Sumberdaya Energi dan Industri Kimia (5865)</b>							<b>6.200</b>	<b>10.200</b>	<b>32.000</b>	<b>13.750</b>	<b>14.250</b>	<b>PTSEIK</b>		
SK 1	Terwujudnya Pilot Project PLT Biogas dari Limbah Sawit (POME)	<i>Jumlah PLT Biogas</i>	Pilot Project		1	1								
		<i>Jumlah Inovasi PLT Biogas</i>	Rekomendasi				1	1.000	21.000	3.000	3.500			
SK 2	Terwujudnya Inovasi Teknologi Bioenergi	<i>Jumlah Inovasi/Layanan Teknologi Bio Crude Oil</i>	Prototipe, Pilot Plant, Pilot Project, Rekomendasi	1	1	1	1	3.800	4.200	5.000	5.000	5.000		

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	<i>Jumlah Inovasi/Layanan Teknologi Biodiesel</i>	Pilot Plant, Rekomendasi		1	1	1	1						
	<i>Jumlah Prototype Biomethanol</i>	Prototipe, Pilot Plant			1	1	1						
	<i>Jumlah Inovasi Teknologi Green Petroleum</i>	Prototipe, Pilot Plant, Rekomendasi			1	1	1						
SK 3	Terwujudnya Inovasi dan Layanan Teknologi Produksi /Pemanfaatan Batubara, Migas, dan Industri Petrokimia	<i>Jumlah Inovasi/Layanan Teknologi Coal Upgrading dan Konversi/Pemanfaatan Batubara</i>	Pengujian, Konsultasi, Pilot Plant, Pilot Project	1	1	1	1	1.200	2.000	2.000	1.250	1.250	
		<i>Jumlah Inovasi/Layanan Teknologi Produksi Pupuk (SRF/CRF)</i>	Konsultasi, Pilot Plant, Pilot Project, Rekomendasi	1	1	1	1	1.200	3.000	4.000	4.500	4.500	
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Material (3501)</b>							<b>8.800</b>	<b>9.500</b>	<b>10.500</b>	<b>12.800</b>	<b>14.750</b>	<b>PTM</b>	
SK 1	Terwujudnya Inovasi Teknologi Biocompatible material alat kesehatan	<i>Jumlah industri yang memanfaatkan paket teknologi biocompatible</i>	Pilot Plant	1				1.800	2.000	2.300	2.800	2.750	
		<i>Jumlah produk yang memperoleh ijin edar</i>	Rekomendasi		1								
SK 2	Terwujudnya Inovasi teknologi material untuk daya saing industri polimer	<i>Jumlah teknologi material karet modifikasi untuk bahan pesawat terbang</i>	Prototipe	1	1			3.000	3.500	3.000	4.000	5.000	
			Pilot Plant			1							
			Rekomendasi				1						
		<i>Jumlah prototipe material karet modifikasi untuk ship launcher</i>	Prototipe	1									

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<i>airbag</i>													
		Pilot Plant			1									
		Rekomendasi				1								
	<i>Jumlah prototipe material karet modifikasi untuk material rubber dock fender</i>	Prototipe				1								
	<i>Jumlah prototipe komposit polimer untuk komponen bangunan rumah</i>	Prototipe		1										
		Pilot Plant			1									
SK 3	Terwujudnya Inovasi teknologi material untuk daya saing industri logam tanah jarang	<i>Jumlah prototipe nanomaterial logam tanah jarang</i>	Prototipe	1	1	1	1	2.000	2.000	2.200	3.000	3.000		
		<i>Jumlah prototipe aplikasi logam tanah jarang</i>	Prototipe	1	1	1								
		Pilot Plant				1								
SK 4	Peralatan dan Mesin Penunjang Inovasi	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin untuk Inovasi Teknologi material</i>	Paket Peralatan	1	1	1	1	2.000	2.000	3.000	3.000	4.000		
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Polimer (3468)</b>														
SK 1	Terlaksananya Layanan Jasa Teknologi Polimer (PNBP)	<i>Jumlah Layanan Jasa Teknologi Polimer</i>	Layanan Teknologi		275	275	275		5.500	5.100	5.500	6.100		
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bahan Bakar, Rekayasa dan Disain (3469)</b>														
SK 1	Terlaksananya Layanan Jasa Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain (PNBP)	<i>Jumlah Layanan Jasa Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain</i>	Layanan Teknologi			1	1		400	400	450	450		
		<i>Jumlah Pengujian Bahan Bakar Padat dan Cair</i>	Layanan			3	3		400	400	450	450		
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Jaringan, Informasi dan Komunikasi (3465)</b>														

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
SK 1	Terlaksananya Layanan Jasa Teknologi Jaringan Informasi IPTEK (PNBP)	<i>Jumlah Layanan Jasa Teknologi Jaringan Informasi Iptek</i>	Layanan Teknologi			13	13	13		4.100	4.600	5.000	5.500	
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kekuatan Struktur (3459)</b>														
SK 1	Terwujudnya kereyasaan teknologi kekuatan struktur untuk Produk Bidang Hankam yang memiliki daya saing											1.500	1.500	
		<i>Jumlah pengujian bidang Hankam yang memiliki daya saing</i>	Pengujian				1						150	
SK 2	Terwujudnya kereyasaan teknologi kekuatan struktur untuk Produk Bidang Permesinan yang mendukung kemandirian bangsa											300	150	
		<i>Jumlah pengujian bidang Permesinan yang mendukung kemandirian bangsa</i>	Pengujian		2	1						300	150	
SK 3	Terwujudnya kereyasaan teknologi bidang Kekuatan Struktur bidang Hankam yang mendukung kemandirian bangsa											300	150	
		<i>Jumlah pengujian bidang Hankam yang mendukung kemandirian bangsa</i>	Pengujian		2	1						300	150	
SK 4	Terwujudnya kereyasaan teknologi bidang Kekuatan Struktur bidang Transportasi yang mendukung kemandirian bangsa											150	150	
		<i>Jumlah referensi teknis bidang Transportasi yang mendukung kemandirian bangsa</i>	Referensi Teknis			1	1					150	150	
SK 5	Terwujudnya kereyasaan teknologi kekuatan struktur untuk Produk Bidang Maritim yang mendukung kemandirian bangsa												150	
		<i>Jumlah referensi teknis bidang Maritim yang mendukung kemandirian bangsa</i>	Referensi Teknis				1						150	
		<i>Jumlah Revitalisasi Peralatan Laboratorium Kekuatan Struktur</i>	Paket Peralatan			1	1					60.000	50.000	
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, Aeroakustika (3513)</b>														
													B2TA3	

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
										600	2.200	2.300	
SK 1 Terwujudnya kerekyasaan teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, Aeroakustika untuk produk bidang Hankam yang memiliki daya saing										600	1.500		
	1. Jumlah pengujian bidang Hankam yang memiliki daya saing			1	1	1							
	Jumlah Uji/Analysis Aerodinamika Model Alap-Alap	Pengujian		1						-	500		
	Jumlah Uji/Analysis Aerodinamika Model MALE	Pengujian			1					600			
	Jumlah Uji/Analysis Aeroelastika Model MALE	Pengujian				1					1.000		
											200	1.600	
	2. Jumlah pengujian bidang Hankam yang memiliki daya saing				1	3							
	Pengujian Noise & Vibration System model platform kapal selam mini	Pengujian				1							500
	3. Jumlah pengujian dan analisis Numerik Model RUDAL				1						200		
	Pengujian Aerodinamis Model Rudal	Pengujian				1							600
Pengujian Aeroakustika Model RUDAL	Pengujian				1							500	
SK 2 Terwujudnya kerekyasaan teknologi Aerodinamika, Aeroelastika,										-	500	700	

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Aeroakustika untuk Produk Bidang Transportasi yang mendukung kemandirian bangsa	Jumlah Desain bidang Aerodinamika, Aeroelastika, Aeroakustika bidang Transportasi yang mendukung kemandirian bangsa	Desain			1								
	Jumlah desain dan analisis Numerik Aeroacoustics Barrier	Desain			1					-			
	Jumlah Uji/Analysis FEM (Numerik) Struktur Jembatan Khusus	Desain			1					-			
	Jumlah Pengujian bidang Aerodinamika, Aeroelastika, Aeroakustika bidang Transportasi yang mendukung kemandirian bangsa	Pengujian			1	1	1						
	Jumlah Uji/Analysis Aeroacoustics Barrier	Pengujian			1					-			
	Jumlah Uji/Analysis Aerodinamika Jembatan Khusus	Pengujian				1					500		
	Jumlah Uji/Analysis Aeroelastika Jembatan Khusus	Pengujian					1						700
	Jumlah Revitalisasi Peralatan Laboratorium Aerodinamika, Aeroelastika, Aeroakustika					1	1				100.000	40.000	
Sk 4 Terlaksananya Layanan Jasa Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika (PNBP)	Jumlah Layanan Jasa Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika	Layanan Teknologi	1	1	1	1	1			5.405	5.620	5.900	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	B	B	B	B	A						
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan (3490)										8.500	24.000	48.500	PTIPK

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
SK 1	Terwujudnya produk bidang Hankam yang memiliki daya saing (DS)	Jumlah Disain Teknologi Bidang Hankam yg memiliki daya saing (DS)	Desain		1	1	1			4.000	10.000	20.000		
		Jumlah Prototype Teknologi Bidang Hankam yg memiliki daya saing (DS)	Prototipe	2	1	-	1				1.500			
SK 2	Terwujudnya produk bidang Hankam yang memiliki kemandirian bangsa	Jumlah Disain Teknologi Bidang Hankam yg memiliki kemandirian bangsa (KB)	Desain		1	3	2	2		4.500	12.500	28.500		
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Permesinan (3487)</b>									<b>703</b>	<b>1.190</b>	<b>2.495</b>	<b>7.100</b>	<b>5.600</b>	<b>PTIP</b>
SK 1	Terwujudnya Produk Bidang Permesinan yang Memiliki Daya Saing	<b>1. Jumlah Disain Teknologi Bidang Permesinan yang Memiliki Daya Saing</b>	Desain	1	2	1	1	1	103	187	309	850	1.000	
		Desain Lube Oil System Turbin Uap BP 4 MW	Desain	-	1	-	-	-		139				
		(Detail Eng Design ) DED Baseframe Turbin Uap BP (TUBBP) 4 MW	Desain	1	-	-	-	-	103					
		DED Roll & Mill Cheek	Desain	-	-	-	1	-				850		
		DED Cane Elevator	Desain	-	-	-	-	1					1.000	
		DED Stator Motor Listrik ≥ 150 KW	Desain	-	1	-	-	-		48				
		DED Rotor Motor Listrik ≥ 150 KW	Desain	-	-	1	-	-			309			
		<b>2. Jumlah Prototype Teknologi Bidang Permesinan yang Memiliki Daya Saing</b>	Prototipe	1	0	1	4	0	600	-	1.851	5.950	-	
		Prototipe Baseframe Turbin Uap BP 4 MW	Prototipe	1	-	-	-	-	600					

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Prototipe Lub Oil System Turbin Uap BP 4 MW	Prototipe	-	-	1	-	-			1.851		
		Prototipe Control System & Gearbox TUBP 4 MW	Prototipe	-	-	-	1	-				4.000	
		Prototipe Stator Motor Listrik 150 KW	Prototipe	-	-	-	1	-				600	
		Prototipe Rotor Motor Listrik 150 KW	Prototipe	-	-	-	1	-				600	
		Prototipe Mekanik Bow Thruster	Prototipe	-	-	-	1	-				750	
		<b>3. Jumlah Produk bidang Transportasi yg mendukung kemandirian bangsa</b>	Pengujian	0	0	0	1	2	0	0	0	300	4.000
		Uji Sub sistem Motor Listrik	Pengujian	-	-	-	1	-	0	0	0	300	-
		OT & E Prototipe Turbin Uap BP 4 MW	Pengujian	-	-	-	-	1					2.500
		OT & E Prototipe Motor Listrik ≥ 150 KW	Pengujian	-	-	-	-	1					1.500
		<b>4. Jumlah Pemanfaatan Produk Teknologi Bidang Permesinan yang Memiliki Daya Saing (Mesin Bubut CNC 5.5 KW)</b>	Implementasi	-	-	-	-	1	-	-	-	-	600
SK 2	Terwujudnya Produk Bidang Permesinan yang Mendukung Kemandirian Bangsa	<b>Jumlah Disain Teknologi Bidang Permesinan yang mendukung kemandirian bangsa</b>	Desain	0	1	1	0	0	0	1.003	334	0	
		Standar Front End Engineering Design (FEED) Pabrik Gula	Desain	-	1	-	-	-		1.003			
		Standar DED & Optimasi Pabrik Gula	Desain	-	-	1	-	-			334		
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Mesin Perkakas, Produksi dan Otomasi (3464)</b>													<b>B MEPPPO</b>



SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
								5.394	5.579	5.215	7.775	8.080		
SK 1	Terwujudnya kerekrayasaan teknologi Mesin Perkakas, Produksi, dan Otomasi untuk Produk bidang Hankam yg mendukung Kemandirian Bangsa							-	-	435	850	1.100		
	<b>1. Jumlah Desain Teknologi Bidang Hankam yang mendukung Kemandirian Bangsa</b>	Desain	-	-	2	-	-	-	-	435	-	-		
	Desain Sistem Kendali FIN RUDAL				1					150				
	Desain Sistem Produksi langsung RUDAL				1					285				
	<b>2. Jumlah Prototipe Teknologi Bidang Hankam yang mendukung Kemandirian Bangsa</b>	Prototipe	-	-	-	1	1	-	-	-	850	-		
	Model Uji dan Prototipe sistem kendali RUDAL				1						350			
	Model sistem produksi langsung RUDAL						1				500			
	<b>3. Jumlah Pengujian Produk Teknologi Bidang Hankam yang mendukung Kemandirian Bangsa</b>	Pengujian	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1.100		
	Pengujian sistem kendali RUDAL					1						350		
	Pengujian model sistem produksi langsung RUDAL					1						750		
SK 2	Terwujudnya kerekrayasaan teknologi kekuatan struktur untuk Produk Bidang Permesinan yang mendukung kemandirian bangsa							659	881	505	2.000	1.400		
	<b>1. Jumlah Desain Teknologi Bidang Permesinan yang mendukung Kemandirian Bangsa</b>	Desain	1	2	-	1	-	659	122	-	800	-		

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Standar Instrumentasi & Kontrol Front End Engineering Design (FEED) Pabrik Gula			1					50					
	DED Mesin Bubut CNC 5,5 KW		1					659						
	RSNI Mesin Perkakas			1					72					
	Basic Design Jig & Fixtures Industri Perkapalan					1					800			
	<b>2. Jumlah Prototipe Teknologi Bidang Permesinan yang mendukung Kemandirian Bangsa</b>	Prototipe	-	1	1	1	1	-	759	505	400	1.000		
	Sub Assembly Mesin Bubut CNC 5,5 KW			1					759					
	Prototipe Mesin Bubut CNC 5,5 KW				1					505				
	Integrasi Sistem kontrol TUBP 4 MW					1					400			
	DED Jig & Fixtures Industri Perkapalan						1					1.000		
	<b>3. Jumlah Pengujian Produk Teknologi Bidang Permesinan yang mendukung Kemandirian Bangsa</b>	Desain			0	1	1	-	-	-	800	400		
	Pengujian Prototipe TUBP 4 MW						1					400		
	Pengujian Prototipe Mesin Bubut CNC 5,5 KW					1					800			
SK 3	Terwujudnya kerekrayasaan teknologi Mesin Perkakas, Produksi, dan							600	-	-	-	-		

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Otomasi untuk Produk bidang Transportasi yg mendukung Kemandirian Bangsa	<i>Jumlah Desain Teknologi Bidang Transportasi yang mendukung Kemandirian Bangsa</i>	Desain	2					600	-	-	-	-	
	<i>Desain Teknologi Keselamatan Kereta di Perlintasan Sebidang</i>		1					300					
	<i>Konseptual Desain Komunikasi Nirkabel Teknologi Keselamatan Sarana KA</i>		1					300					
SK 4	Terwujudnya kereyakaan teknologi Mesin Perkakas, Produksi, dan Otomasi untuk Produk bidang Maritim yg mendukung Kemandirian Bangsa							42,26	-	-	-	-	
	<i>Jumlah Desain Teknologi Bidang Maritim yang mendukung Kemandirian Bangsa</i>	Desain	1					42,26	-	-	-	-	
	<i>Desain Pengukuran Kinerja Workshop Fabrikasi Galangan Kapal</i>		1					42,26					
	<i>Jumlah Revitalisasi Peralatan Laboratorium Mesin Perkakas, Produksi dan Otomasi</i>				1	1					40.000	40.000	
SK 5	Terwujudnya Layanan Jasa Teknologi Mesin Perkakas, Produksi dan Otomasi (PNBP)							741	713,43	734,50	775	800	
	<i>Jumlah layanan Jasa Teknologi Mesin Perkakas, Produksi dan Otomasi</i>	Layanan Teknologi	1	1	1	1	1	741	713,43	735	775	800	
SK 6	Terlaksananya Layanan Internal (Overhead)							-	37	15,5	50	50	
	<i>Jumlah Layanan Internal</i>	Layanan	-	-	1	1	1	-	36,57	15,5	50	50	
SK 7	Terlaksananya Layanan Perkantoran							3.352	3.948	3.525	4.100	4.730	
	<i>Layanan Perkantoran</i>	Bulan	12	12	12	12	12	3.352	3.948,40	3.524,80	4.100	4.730	

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Sistem &amp; Prasarana Transportasi (3495)</b>							-	-	3.000	5.200	800	PTSPT	
SK 1	Terwujudnya Produk bidang Transportasi yg mendukung kemandirian bangsa								1.600	2.000			
	<i>Teknologi Transportasi perkotaan</i>								1.600	2.000			
	<i>1. Jumlah pilot project teknologi transportasi perkotaan yang mendukung kemandirian bangsa</i>	Pilot Project		1	2	1							
	<i>Desain Sistem Transportasi Perkotaan Terintegrasi</i>	Desain			1								
	<i>Prototipe Transportasi Perkotaan berbasis ITS</i>	Prototipe		1	1					1.250			
	<i>Pilot Project Teknologi Pengelolaan Transportasi Perkotaan Terpadu</i>	Pilot Project				1							
	<i>Teknologi Perkeretaapian</i>									600	1.700		
	<i>2. Jumlah Rekomendasi Transportasi Massal Berbasis Rel yang mendukung kemandirian bangsa</i>	Rekomendasi				1					1.500		
	<i>Prototipe Sistem Keselamatan Kereta Api</i>	Prototipe		1							1.700		
	<i>Rekomendasi Teknologi Transportasi Perkereta Apian Regional</i>	Rekomendasi			1					600			
	<i>Rekomendasi Transportasi Masal Perkotaan</i>	Rekomendasi				1							
	<i>Infrastruktur Jembatan</i>									800	1.500	800	
	<i>3. Jumlah Standar Desain Infrastruktur Jembatan yang Mendukung Kemandirian Bangsa</i>												

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<i>Jumlah infrastruktur jembatan yang mendukung kemandirian bangsa</i>	Desain			1	1	1							
	<i>Standar Desain Jembatan Bentang Pendek</i>	Desain			1					800				
	<i>Standar Desain Jembatan Bentang Menengah</i>	Desain				1						1500		
	<i>Standarisasi Desain dan Sistem Uji Jembatan</i>	Desain					1							800
<b>Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan Teknologi Termodinamika, Motor dan Propulsi [3471]</b>								<b>5.441</b>	<b>6.669</b>	<b>16.641</b>	<b>58.679</b>	<b>49.167</b>	<b>BTZMP</b>	
SK 1	Terwujudnya kereakayaan teknologi bidang Termodinamika Motor dan Propulsi pada produk bidang Hankam yang memiliki daya saing								260	285	1.100	1.085		
	<i>Jumlah prototipe bidang Hankam yang memiliki daya saing</i>	Prototipe				1					600			
	<i>Jumlah prototipe engine 25 HP skala industri</i>					1					600			
	<i>Jumlah pengujian bidang Hankam yang memiliki daya saing</i>	Pengujian	1	1	1	2		260	285	500	1.085			
	<i>Jumlah pengujian Propulsi untuk Engine 25 HP skala LAB</i>		1					260						
	<i>Jumlah pengujian endurance Engine 25 HP skala LAB</i>			1					285					
	<i>Jumlah Pengujian endurance Engine 25 HP skala industri</i>					1						885		
	<i>Jumlah pengujian karakteristik engine MALE 120 HP</i>				1						500			
	<i>Jumlah pengujian integrasi engine MALE 120 HP</i>					1						200		

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
SK 2	Terwujudnya kereakayaan teknologi bidang Termodinamika Motor dan Propulsi pada produk bidang Permesinan yang memiliki daya saing										200	200	
	<i>Jumlah pengujian bidang permesinan yang memiliki daya saing</i>	Pengujian				1	1				200	200	
	<i>Jumlah SOP Uji Performance Turbin Island TUBP 4 MW</i>					1					200		
	<i>Jumlah Pengujian Performance Turbin Island TUBP 4 MW</i>						1					200	
SK 3	Terwujudnya kereakayaan teknologi bidang Termodinamika, Motor dan Propulsi pada produk bidang Hankam yang mendukung kemandirian bangsa								200	350	350	150	
	<i>Jumlah desain bidang Hankam yang mendukung kemandirian bangsa</i>	Desain	1	1	1				200	200	200	-	
	<i>Jumlah Preliminary Design Sistem HVAC KCR60-2</i>		1						200				
	<i>Jumlah Design Sistem HVAC Kapal Selam Mini</i>			1						200			
	<i>Jumlah Design life support system Kapal Selam Mini</i>				1						200		
	<i>Jumlah pengujian bidang Hankam yang mendukung kemandirian bangsa</i>	Pengujian		1	1	1				150	150	150	
	<i>Jumlah pengujian karakterisasi Motor Pendorong Rudal</i>			1						150			
	<i>Jumlah pengujian komponen sistem Pendorong Rudal</i>				1						150		
	<i>Jumlah pengujian Sistem Motor Pendorong Rudal</i>					1						150	
SK 4	Terwujudnya kereakayaan teknologi bidang Termodinamika pada produk								200				

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
bidang Permesinan yang mendukung kemandirian bangsa	<i>Jumlah referensi teknis bidang permesinan yang memiliki daya saing</i>	Referensi Teknis		1					200					
	<i>Jumlah referensi teknis DED Penukar Kalar PG Kap. 6000 TCD</i>			1					200					
SK 5 Terwujudnya kerekesayaan teknologi bidang Termodinamika Motor dan Propulsi pada produk bidang Transportasi yang mendukung kemandirian bangsa								160	200	16.000	50.000	40.000		
	<i>Jumlah desain bidang transportasi yang mendukung kemandirian bangsa</i>	Desain	1	1				160	200	-	-	-		
	<i>Jumlah Desain Sistem Injeksi</i>		1					160						
	<i>Jumlah Desain Sistem Injeksi B-100</i>			1					200					
SK 6 Terlaksananya Layanan Jasa Teknologi Termodinamika, Motor dan Propulsi (PNBP)	<i>Jumlah Layanan Jasa Teknologi Termodinamika, Motor dan Propulsi</i>	Layanan Teknologi	3	3	3	3	3	5.281	5.809	6,39	7.029	7.732		
	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	IKM	B	B	B	B	A							
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Industri Maritim (5866)</b>								-	3.036	3.500	9.150	14.150	<b>PTRIM</b>	
SK 1 Terwujudnya produk bidang Maritim yang memiliki kemandirian bangsa									1.336	2.141	4.650	9.200		
	<i>1. Jumlah Desain Kepelabuhanan dan TRSKDP yang mendukung kemandirian bangsa</i>	Desain	1	1	3	3	3		1.336	2.141	4.650	9.200		
	<i>Desain Pelabuhan Marina Beltung</i>		1	1	1	1	1		1.336	1.386	2.650	3.200		
	<i>Desain Inovasi Floating Breakwater</i>				1	1	1							

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET		
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	<i>Desain Tata Ruang Spasial Kepelabuhanan dan Dinamika Pantai</i>				1	1	1			755	2.000	6.000			
									1.700	1.359	4.000	4.450			
	<i>2. Jumlah Desain Standar Kapal Niaga yang mendukung kemandirian bangsa</i>	Desain		2	4	3	1		1.700	1.359	4.000	4.450			
	<i>Desain Standar Kapal Niaga /Kapal Ikan</i>			1	2	1	1		529	700	2.000	2.000			
	<i>Model Klaster Industri Galangan</i>			1	1	1			500	309	1.000	1.000			
	<i>Desain Komponen Kapal dan Teknologi Keselamatan Pelayaran</i>					1	1			671	350	1.000	1.450		
	<i>3. Jumlah Rekomendasi Anjungan Lepas Pantai yang mendukung kemandirian bangsa</i>	Rekomendasi					1					500	500	<b>PTRIM</b>	
	<i>Desain Infrastruktur Migas Lepas Pantai</i>					1	1				500	500			
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Hidrodinamika (3510)</b>								-	-	5.178	7.523	5.666	<b>BTH</b>		
SK 1 Terwujudnya Kerekesayaan Teknologi Hidrodinamika untuk Produk Bidang Maritim yang mendukung Kemandirian Bangsa										110.848	99.000	1.500			
	<i>1. Jumlah Desain Teknologi Bidang Maritim yang mendukung kemandirian bangsa</i>	Desain		2	1	1				348	1.500				

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Jumlah Desain Key Plan (Hull Construction, Machinery outfitting, hull outfitting, electrical outfitting ) Kapal Kontainer 100 TEUs			1										
	Jumlah Desain Requirement Crane Kapal Kontainer 100 TEUs			1										
	Jumlah Desain Key Plan (Hull Construction, Machinery outfitting, hull outfitting, electrical outfitting ) Kapal Niaga/Perikanan				1	1				348	1.500			
	2. Jumlah Pengujian Bidang Maritim yang mendukung kemandirian bangsa	Pengujian			1	1	1			250	1.500	1.500		
	Jumlah Pengujian Kapal Niaga/Perikanan				1	1	1			250	1.500	1.500		
	3. Jumlah Audit Teknologi Bidang Maritim yang mendukung kemandirian bangsa	Audit Teknologi		1	1					250				
	Jumlah Audit Teknologi Makro Galangan Kapal			1										
	Jumlah Audit Teknologi Mikro Galangan Kapal				1					250				
	Jumlah Revitalisasi Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Paket Peralatan			1	1				110.000	96.000			
SK 2	Terwujudnya Kerekayasaan Teknologi Hidrodinamika untuk Produk Bidang									1.438	1.000	1.000		

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Hankam yang mendukung Kemandirian Bangsa	1. Jumlah Pengujian Bidang Hankam yang mendukung kemandirian bangsa	Pengujian		2	2	1				1.438	500			
	Jumlah Pengujian resistance dan propulsi KCR			1	1					1.000				
	Jumlah Pengujian tahanan kapal dan openwater propeller model kapal selam mini				1									
	Jumlah Pengujian Propulsi model kapal mini					1				438				
	Jumlah Pengujian Balast Condition kapal selam mini						1					500		
	2. Jumlah Desain Teknologi Bidang Hankam yang mendukung kemandirian bangsa	Pengujian				1						500		
	Jumlah Pengujian Hidrodinamika Pengembangan KCR						1					500		
	3. Jumlah Desain Teknologi Bidang Hankam yang mendukung kemandirian bangsa	Desain	1	1		1	1					500	1.000	
	Jumlah Preliminary Desain dan Manufaktur fasilitas uji modelKapal selam			1										
	Jumlah Basic Desain platform kapal selam mini				1									
	Jumlah Desain platform /hull construction Kapal Selam mini						1					500		
	Jumlah Desain platform /hull outfitting Kapal Selam mini							1						1.000

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
SK 3 Terlaksananya Layanan Jasa Teknologi Hidrodinamika (PNBP)	Jumlah Layanan Jasa Teknologi Hidrodinamika	Layanan Teknologi	3	3	3	3	3			2.892	3.023	3.166	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	B	B	B	B	A						
<b>Pengkajian dan Penerapan Teknologi Infrastruktur Pelabuhan &amp; Dinamika Pantai (3474)</b>							<b>1.650</b>	<b>1.791</b>	<b>1.350</b>	<b>97.350</b>	<b>1.500</b>	<b>BTIPDP</b>	
SK 1 Terwujudnya Kerekayasaan Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai untuk Produk Bidang Maritim yang mendukung Kemandirian Bangsa	Jumlah Survey & Pengujian Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai (SPIPDP) untuk Produk Bidang Maritim yang mendukung Kemandirian Bangsa	Survey, Pengujian	1	2	3	2	1		909	1.017	-	96.000	-
	Jumlah SPIPDP untuk Pra FS Pelabuhan Marina Belitung	Survey, Pengujian	1						909				
	Jumlah SPIPDP untuk Master Plan dan Basic Design Pelabuhan Marina Belitung	Survey, Pengujian		1						1.017			
	Jumlah SPIPDP untuk Detil Design Pelabuhan Marina Belitung	Survey, Pengujian			1								
	Jumlah SPIPDP untuk FS Inovasi Floating Breakwater	Survey, Pengujian			1								
	Jumlah SPIPDP untuk Basic Design Inovasi Floating Breakwater	Survey, Pengujian				1							
	Jumlah SPIPDP untuk Detil Design Inovasi Floating Breakwater	Survey, Pengujian					1						
	Jumlah SPIPDP untuk Basic Design Tata Ruang Spasial Kepelabuhanan & Dinamika Pantai	Survey, Pengujian			1								

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah SPIPDP untuk Detil Design Tata Ruang Spasial Kepelabuhanan & Dinamika Pantai	Survey, Pengujian				1							
	Jumlah Revitalisasi Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Infrastruktur Pelabuhan & Dinamika Pantai	Paket Peralatan				1					96.000		
SK 2 Terlaksananya Layanan Jasa Teknologi Infrastruktur Pelabuhan & Dinamika Pantai (PNBP)	Jumlah Layanan Jasa Teknologi Infrastruktur Pelabuhan & Dinamika Pantai	Layanan Teknologi	1	1	1	1	1	741	774	1350	1.350	1.500	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	B	B	B	B	A						

1.2 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN BPPT

SASARAN PROGRAM	IKP	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
SP 6	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan BPPT (kesesuaian dengan SAI dan SAP)	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	9.330	13.030	14.680	15.820	17.120	
		Nilai evaluasi pelaksanaan SAKIP	Nilai SAKIP	B	BB	BB	BB	BB	4.350	4.850	5.130	5.540	6.150	
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai RB	B	BB	BB	BB	BB	800	800	3.000	3.500	4.000	
		Indeks kepuasan masyarakat	Nilai IKM	B	B	B	B	A	5.660	10.760	15.080	16.390	17.630	
		Peringkat hasil evaluasi keterbukaan informasi publik	Peringkat	20 Besar	10 Besar	8 Besar	6 Besar	5 Besar	6.030	6.030	9.500	10.000	11.500	
		Peringkat hasil Nilai pelayanan e-gov (PEGI)	Peringkat	Baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	950	950	1.900	2.000	2.100	

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Dukungan Manajemen dan Administrasi Sumber Daya Manusia dan Organisasi BPPT (3455)</b>								<b>5.080</b>	<b>5.080</b>	<b>10.000</b>	<b>11.600</b>	<b>14.100</b>	SDMO	
SK 1	Terwujudnya Perencanaan dan pengembangan SDM	Jumlah laporan Perencanaan dan pengembangan SDM	Laporan	2	2	2	2	2	1.840	1.840	2.500	2.800		3.500
SK 2	Terkelolanya karir dan mutasi pegawai	Jumlah laporan Pengelolaan karir dan mutasi pegawai	Laporan	2	2	2	2	2	930	930	1.300	1.500		2.000
SK 3	Terlaksananya Pelayanan kesejahteraan dan kinerja pegawai	Jumlah laporan kesejahteraan dan kinerja pegawai	Laporan	14	14	14	14	14	1.130	1.130	1.500	1.800		2.100
SK 4	Terwujudnya Pengembangan organisasi dan tata laksana	Jumlah laporan Pengembangan organisasi dan tata laksana	Laporan	46	46	46	46	46	380	380	1.700	2.000		2.500
SK 5	Terwujudnya Penguatan Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai RB	B	BB	BB	BB	A	800	800	3000	3500		4000
<b>Dukungan Manajemen Perencanaan Program dan Kegiatan serta Pengelolaan Perbendaharaan, Verifikasi, dan Akuntansi Keuangan BPPT (5861)</b>								<b>366.672</b>	<b>315.952</b>	<b>329.970</b>	<b>354.864</b>	<b>381.711</b>	RenKeu	
SK 1	Terwujudnya Perencanaan dan penyusunan program, kegiatan dan anggaran BPPT	Jumlah Laporan perencanaan dan penyusunan program, kegiatan dan anggaran BPPT	Laporan	12	12	12	12	12	6.330	7.330	7.880	8.470		9.100
SK 2	Terlaksananya Evaluasi dan pemantauan program, kegiatan dan anggaran BPPT	Jumlah Laporan evaluasi dan pemantauan program, kegiatan dan anggaran BPPT	Laporan	10	10	10	10	10	4.100	4.500	4.680	4.990		5.400
SK 3	Terlaksananya Layanan manajemen perencanaan yang akuntabel	Jumlah Laporan manajemen perencanaan yang akuntabel	Laporan	6	6	0	0	0	1.500	1.500	-	-		-
SK 4	Terwujudnya Peningkatan kapasitas lembaga.	Jumlah Laporan peningkatan kapasitas lembaga	Laporan	5	5	0	0	0	3.072	3.072				
		Jumlah laporan pengelolaan strategi penyusunan dan pemasaran program/kegiatan BPPT Mendukung prioritas nasional	Laporan			2	2	2			7.240	7.964	8.761	

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
SK 5	Terlaksananya Verifikasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	Jumlah laporan Pelaksanaan Pengelolaan Perbendaharaan	Laporan	3	3	3	3	3	3.620	3.620	3.620	3.890	4.180	
		Jumlah laporan Pelaksanaan Verifikasi	Laporan	1	1	1	1	1	1.710	1.710	1.710	1.840	1.980	
SK 6	Terlaksananya Akuntansi Keuangan dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan Pelaksanaan Akuntansi Keuangan dan pelaporan keuangan	Laporan	3	3	3	3	3	2.000	2.000	2.000	2.150	2.320	
SK 7	Terlaksananya Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Belanja Pegawai	Laporan	12	12	12	12	12	344.340	292.220	302.840	328.230	352.810	
<b>Dukungan Manajemen Layanan Umum BPPT (5862)</b>									<b>75.300</b>	<b>153.680</b>	<b>170.600</b>	<b>197.970</b>	<b>221.010</b>	<b>B Umum</b>
SK 1	Terlaksananya kerumahaan dan tata usaha pimpinan	Jumlah laporan Pelaksanaan kerumahaan dan tata usaha pimpinan	Laporan	1	1	1	1	1	25.800	30.500	36.800	45.600	56.600	
SK 2	Terpenuhinya Perlengkapan BPPT	Jumlah laporan Pelaksanaan Perlengkapan BPPT	Laporan	3	3	3	3	3	48.500	62.700	72.300	79.450	85.850	
SK 3	Terkelolanya barang milik negara	Jumlah laporan Pengelolaan barang milik negara	Laporan	1	1	1	1	1	1.000	3.700	4.800	5.200	5.700	
SK 4	Terlaksananya Layanan Jasa Umum (PNBP)	Jumlah Layanan Jasa Umum(PNBP)	Laporan	1	1	1	1	1	1.800	1.710	1.800	2.030	2.190	
SK 5	Terlaksananya Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Belanja Operasional	Laporan		12	12	12	12		54.980	54.990	66.340	71.320	
<b>Dukungan Manajemen Hukum, Kerjasama dan Kehumasan BPPT (5863)</b>									<b>8.510</b>	<b>9.010</b>	<b>14.250</b>	<b>15.630</b>	<b>17.150</b>	<b>BHKH</b>
SK 1	Terlaksananya Kehumasan	Jumlah laporan pelaksanaan Kehumasan	Laporan	5	5	5	5	5	4.280	4.280	4.500	5.000	5.500	
SK 2	Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga dan Industri	Jumlah laporan pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Industri	Laporan	2	2	2	2	2	2.730	2.730	2.730	2.930	3.150	
SK 3	Terlaksananya layanan Hukum dan HKI	Jumlah laporan layanan Hukum dan pengelolaan HKI	Laporan	3	3	3	3	3	1.500	2.000	7.020	7.700	8.500	
<b>Dukungan Manajemen Layanan Sistem Informasi dan Standardisasi BPPT (3453)</b>									<b>5.570</b>	<b>5.570</b>	<b>10.850</b>	<b>11.550</b>	<b>13.550</b>	<b>PMI</b>
SK 1	Terwujudnya Pengembangan sistem dan infrastruktur Jaringan Informasi	Jumlah laporan Pengembangan infrastruktur informasi	Laporan	1	1	1	1	1	1.750	1.750	6.250	6.350	7.450	
SK 2	Terwujudnya Pengembangan Aplikasi e-Government	Jumlah Aplikasi e-Government	Laporan	1	1	1	1	1	950	950	1.900	2.000	2.100	

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Sk 3	Terwujudnya Pengembangan manajemen pengetahuan dan perpustakaan	Jumlah laporan manajemen pengetahuan dan perpustakaan	Laporan	1	1	1	1	1	1.750	1.750	1.400	1.600	1.800	
Sk 4	Terlaksananya layanan standardisasi	Jumlah layanan standardisasi	Laporan	1	8	1	1	1	1.120	1.120	1.300	1.600	2.200	
<b>Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur BPPT (3451)</b>									<b>2.700</b>	<b>3.650</b>	<b>4.840</b>	<b>5.250</b>	<b>5.680</b>	<b>INS</b>
SK 1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK	Persentase rekomendasi audit keuangan dan kinerja BPK yang ditindaklanjuti	Laporan	100	100	100	100	100	350	300	330	410	450	
SK 2	Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Jumlah unit kerja eselon I yang menerapkan SAKIP sesuai dengan peraturan	Laporan	6	6	6	6	6	250	350	450	550	750	
		Jumlah Audit kinerja	Laporan	5	5	5	5	5	290	450	580	610	630	
SK 3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Tingkat kematangan implementasi SPIP	Laporan	3	3	3	3	3	450	750	850	900	1.100	
		Jumlah Review Laporan Keuangan	Laporan	2	2	2	2	2	260	360	600	680	620	
Sk 4	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi	Jumlah unit kerja berpredikat WBK	Laporan	3	3	3	3	3	250	300	450	500	550	
		Persentase laporan gratifikasi yang telah ditindaklanjuti	Laporan	1	1	1	1	1	850	1.140	1.580	1.600	1.580	
		Jumlah laporan PMPRB	Laporan	1	1	1	1	1						
<b>Dukungan Manajemen Pelayanan Jasa Teknologi (3461)</b>									<b>4.870</b>	<b>51.410</b>	<b>53.060</b>	<b>66.090</b>	<b>70.980</b>	<b>Pusyan tek</b>
SK 1	Terlaksananya layanan Jasa Teknologi	Jumlah laporan Pelaksanaan layanan Jasa Teknologi	Laporan	1	1	1	1	1	4.070	45.070	42.000	54.210	58.210	
SK 2	Terlaksananya layanan pemasaran	Jumlah laporan Pelaksanaan layanan pemasaran	Laporan	1	1	1	1	1	400	2.670	3.500	3.760	4.040	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	B	B	B	B	A						
		Jumlah layanan perkantoran	Laporan	1	1	1	1	1		1.000	4.060	4.360	4.690	



SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
SK 3	Tercapainya Layanan Keuangan yang Akuntabel	Opini KAP atas Laporan Pengelolaan Keuangan	Opini KAP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	400	2.670	3.500	3.760	4.040	
Dukungan Manajemen Diklat SDM BPPT dan Pembinaan Nasional Jabfung Perekayasa dan Teknisi Litkayasa (3509)							7.250	7.960	9.550	10.270	11.040		Pusbin diklat	
SK 1	Terwujudnya Pembinaan Nasional Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Litkayasa	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan nasional jabatan fungsional perekayasa dan teknisi litkayasa	Laporan	8	8	8	8	8	2.530	2.560	3.080	3.310	3.560	
SK 2	Terlaksananya Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan	Jumlah laporan Pelaksanaan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan	Laporan	5	5	5	5	5	4.720	5.400	6.470	6.960	7.480	
Pembangunan dan Pengembangan fasilitas BPPT (5207)									182.780	196.490	211.240			
SK 1	Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	1	1	1	1	1		1.760	1.890	2.040		
SK 2	Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Unit	1	1	1	1	1		181.020	194.600	209.200		

## 1.3 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA BPPT

SASARAN PROGRAM	IKP	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
SP 7	Terwujudnya Sarana dan Pra Sarana Perkantoran	Jumlah sarana dan pra sarana perkantoran	Paket	1	1	1	1	1	63.152	32.526	182.780	196.490	211.240	

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (dalam Juta)					KET	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Pembangunan dan Pengembangan fasilitas BPPT (5207)							63.152	32.526	182.780	196.490	211.240			
SK 1	Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	1	1	1	1	1	187	1.262	1.760	1.890	2.040	SK 1
SK 2	Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Unit	1	0	1	1	1	62.965	31.264	181.020	194.600	209.200	SK 2

KEPALA BADAN PENGAJIAN DAN  
PENERAPAN TEKNOLOGI,

UNGGUL PRIYANTO

## ANAK LAMPIRAN 2

## PENJELASAN UMUM

Dalam Dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019 yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPN 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (duapuluh) tahun, yakni tahun 2005 sampai dengan tahun 2025
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang selanjutnya disebut RPJMN 2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan ketiga (RPJMN III), yakni tahun 2015 sampai dengan tahun 2019
5. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019, selanjutnya disebut Renstra K/L, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Nasional Tahun 2015-2019
6. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode I (satu) tahun
7. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode I (satu) tahun
8. Kementerian adalah Perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
9. Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya (termasuk di

dalamnya Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan Lembaga Tinggi)

10. Unit Organisasi Eselon I adalah instansi di bawah Kementerian/Lembaga yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan program unit eselon I dan/atau kebijakan Kementerian/Lembaga.
11. Unit Organisasi Eselon II adalah instansi di bawah unit organisasi eselon I yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan dari program unit eselon I dan/atau kebijakan Kementerian/Lembaga.
12. Unit Kerja Mandiri adalah instansi di bawah unit kerja eselon II yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan dari program unit eselon I dan/atau kebijakan Kementerian/Lembaga.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan adalah penjabaran visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden.
16. Kebijakan Kementerian/Lembaga adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur, dalam bentuk Kerangka Regulasi, serta Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Prioritas adalah arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan.
19. Program adalah penjabaran kebijakan sesuai visi dan misi

Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur.

20. Program Lintas adalah program yang sifatnya memwadahi kegiatan-kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran strategis yang dapat bersifat lintas K/ L.
21. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II/ Satker atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.
22. Kegiatan Prioritas Strategis adalah kegiatan baru yang bersifat strategis (project oriented) dan ditetapkan dalam upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional dan/atau isu-isu yang merupakan Instruksi Presiden dan/atau memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat yang kinerjanya akan dipantau secara khusus.
23. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (*Outcome/Impact*) adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program.
24. Sasaran Program (*Outcome*) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*Output*).
25. Sasaran Kegiatan (*Output*) adalah keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.
26. Proses adalah upaya yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dengan menggunakan sumber daya (*input*).
27. Input adalah segala sesuatu yang digunakan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*).
28. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga.

29. Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program.
30. Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan.
31. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.
32. Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
33. Kerangka Kelembagaan adalah perangkat Kementerian/Lembaga struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara - yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.
34. Masyarakat adalah pelaku pembangunan yang merupakan orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.
35. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
36. Perekayasa adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan sistem, model, nilai, produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika dalam suatu kelompok kerja fungsional (2, 6).
37. Kerekayasa adalah kegiatan bertahap yang secara runtun meliputi penelitian terapan, pengembangan, perekayasa dan pengoperasian (6)

38. Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh pejabat yang berwenang (6).
39. Perekayasaan Teknologi adalah suatu cara atau metode untuk mendesain dan merancang bangun suatu proses atau produk yang dapat menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan, dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika dalam suatu kelompok kerja fungsional. Perkayasaan teknologi dimulai dari Research, Development, Engineering dan Operation. Engineering dan Operation meliputi kemitraan dan pemanfaatan, termasuk juga Layanan Teknologi,
40. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri (5).
41. Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya (2).
42. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi (1).
43. Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yg berorientasi pada Hasil yg ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dgn 5 (lima) tahun dgn memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yg ada atau mungkin timbul. Rencana Stratejik mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan program yg realistis, mengantisipasi masa depan yg diinginkan dan dapat dicapai (Inpres 7/ 1999 ttg AKIP). Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yg berorientasi pada Hasil yg ingin

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dgn 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dgn memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yg ada atau yg mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana stratejik instansi pemerintah, yg setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strateji, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dlm pelaksanaannya (Keputusan Kepala LAN No. 239/ 2003).

44. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah(1).
45. Difusi teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya (2).
46. Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan (2).
47. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (3).
48. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri (5).
49. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri (5).
50. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara (5).
51. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan fektivitas penggunaan sumber daya

secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat (5).

52. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi (5).
53. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri (5).
54. Perusahaan Industri adalah Setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia (5).
55. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (7)
56. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahamandan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (2).
57. Penelitian Terapan adalah kegiatan penelitian multi disiplin ilmu pengetahuan yang dapat dilanjutkan melalui kegiatan pengembangan dan perekayasaan (6).
58. Pengembangan adalah kegiatan ilmupengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru (2)
59. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi (2).
60. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia (2).



61. Invensi adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada sebelumnya yang memperkaya khazanah serta dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperbaiki ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada (2).
62. Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi(1).
63. Lembaga penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disebut lembaga litbang adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan (2).
64. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1).
65. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (1). Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah (2).
66. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri (2).
67. Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia (1).
68. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu (2).
69. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas

dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan.

70. Badan usaha adalah badan atau lembaga berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan (2).
71. Organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (2).
72. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (4).
73. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat. 3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (4)
74. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (4).
75. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (5).
76. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dgn kuantitas dan kualitas terukur (Pasal 1 butir 12, PP 90 Tahun 2010 dan Psl 1 butir 2, PP 8 Tahun 2006).

77. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi (Pasal 1 butir 14, UU 25 Tahun 2004).
78. Kebijakan merupakan arah dan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan masing-masing program untuk tahun rencana (Psl 20 ayat 3, PP 40 Tahun 2006 ttg Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional).
79. Rencana Strategis K/L 2010-2014, selanjutnya disebut Renstra-KL, adalah dokumen perencanaan K/L utk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2010 sampai dgn 2014, yg merupakan penjabaran dari RPJMN 2010-2014 (Permen PPN/ Kepala Bappenas No. 5/ 2009).
80. Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dgn tugas dan fungsi K/L yg disusun dgn berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif (Psl 6 ayat 1, UU 25 Tahun 2004 ttg Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional).
81. Pelanggan adalah pihak-pihak yang memerlukan dan menggunakan produk, jasa atau program BPPT, yaitu industri dan pemerintah
82. Stakeholder adalah pihak-pihak yang berkepentingan atau memiliki harapan terhadap perkembangan kinerja dan program BPPT.
83. Pusat Unggulan Iptek Pusat Unggulan merupakan suatu lembaga yang mengoptimalkan potensi sumber daya iptek yang tersedia sehingga menjadi pusat kegiatan litbangyasa unggulan nasional ataupun hasil kegiatan litbang di pusat tersebut dapat langsung menjadi solusi dari persoalan yang dihadapi saat ini
84. Daya saing - Peningkatan daya saing merupakan resultan dari kinerja berbagai pilar yang menjadi penopangnya, yang meliputi: institusi, infrastruktur, lingkungan ekonomi makro, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pasar finansial, kesiapan teknologis, ukuran pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi (sumber: WEF).
85. Daya saing industri merupakan kesiapan suatu industri untuk berinteraksi agar menjadi lebih kompetitif dalam arti memiliki peluang untuk menang bagi industri tersebut. Kunci keberhasilan untuk meningkatkan daya saing industri dengan mendorong laju inovasi berupa peningkatan nilai tambah dan produktivitas bagi industri tersebut agar bisa bersaing, baik di tingkat lokal, nasional, dan lingkungan global.

86. Daya saing Perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam menghadapi perubahan pasardan perkembangan persaingan untuk memperkuat posisi pasar dan mengembangkan diri
87. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik
88. Klaster industri adalah kumpulan/kelompok bisnis dan industri yang terkait melalui suatu rantai produk umum, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa, atau penggunaan teknologi yang serupa atau saling komplementer (OECD, 2000); Kelompok industri dengan focal/core industry yang saling berhubungan secara intensif dan membentuk partnership, baik dengan supporting industry maupun related industry (Deperindag, 2000);
89. Teknopreneur - pengusahaan yang membangun bisnisnya berdasarkan keahliannya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menghasilkan prosuk inovatif yang berguna tidak hanya bagi dirinya, tetapi bagi kesejahteraan bangsa dan negaranya.

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN  
PENERAPAN TEKNOLOGI,

ttd

UNGGUL PRIYANTO

ANAK LAMPIRAN 3

ABREVIASI

1	PKT	=	Pengkajian Kebijakan Teknologi
2	PTID	=	Pusat Teknologi Inovasi Daerah
3	PTKS	=	Pusat Teknologi Kawasan Spesifik
4	PTKI	=	Pusat Teknopreneur dan Klaster Industri
5	PSTAT	=	Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi
6	BIT	=	Balai Inkubator Teknologi
7	BTIKK	=	Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik
8	TPSA	=	Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam
9	PTPSW	=	Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah
10	PTPSM	=	Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral
11	PTRRB	=	Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana
12	PTL	=	Pusat Teknologi Lingkungan
13	BB-TMC	=	Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca
14	Balai Teksurla	=	Balai Teknologi Survei Kelautan
15	BTPAL	=	Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah
16	TAB	=	Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi
17	PTPP	=	Pusat Teknologi Produksi Pertanian
18	PTA	=	Pusat Teknologi Agroindustri
19	PTB	=	Pusat Teknologi Bioindustri
20	PTFM	=	Pusat Teknologi Farmasi dan Medika
21	BBIO	=	Balai Bioteknologi
22	B2TP	=	Balai Besar Teknologi Pati
23	TIEM	=	Teknologi Informasi, Energi, dan Material
24	PTE	=	Pusat Teknologi Elektronika
25	PTSEIK	=	Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia
26	PTIK	=	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
27	PTM	=	Pusat Teknologi Material
28	BJIK	=	Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi
29	BTP	=	Balai Teknologi Polimer
30	BTB2RD	=	Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Desain
31	B2TKE	=	Balai Besar Teknologi Konversi Energi

32 TIRBR	=	Teknologi Industri. Rancang Bangun dan Rekayasa
33 PTIPK	=	Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan
34 PTIP	=	Pusat Teknologi Industri Permesinan
35 PTSPT	=	Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi
36 PTRIM	=	Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim
37 BT2MP	=	Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi
38 BTIPDP	=	Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai
39 BT MEPPPO	=	Balai Teknologi Mesin Perkakas, Produksi dan Otomasi
40 BTH	=	Balai Teknologi Hidrodinamika
41 B2TKS	=	Balai Besar Kekuatan Struktur
42 BBTA3	=	Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika dan Aeroakustika
43 SETAMA	=	Sekretariat Utama
44 RORENKEU	=	Biro Perencanaan <u>dan Keuangan</u>
45 ROSDMO	=	Biro Sumberdaya Manusia dan Organisasi
46 ROUMUM	=	Biro Umum
47 ROHKH	=	Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
48 PUSBINDIKLAT	=	Pusat Pembinaan. Pendidikan. dan Pelatihan
49 PMI	=	Pusat Manajemen Informasi.
50 INSP	=	Inspektorat
51 PUSYANTEK	=	Pusat Pelayanan Teknologi
52 PPBT	=	perusahaan pemula berbasis teknologi
53 Renstra	=	Rencana Strategis
54 RPJMN	=	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
55 RPJPN	=	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
56 RKP	=	Rencana Kerja Pemerintah
57 Renja K/L	=	Rencana Kerja Kementrian/Lembaga
58 RKT	=	Rencana Kinerja Tahunan
59 SAKIP	=	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
60 LAKIP	=	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
61 PK	=	Perjanjian Kinerja
62 ADIK	=	Arsitektur Dan Informasi Kinerja

63	TRL	=	<i>Technology Readiness Level</i>
64	IKU	=	Indikator Kinerja Utama
65	IKSS	=	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
66	IKP	=	Indikator Kinerja Program
67	IKK	=	Indikator Kinerja Kegiatan
68	SS	=	Sasaran Strategis
69	TS	=	Tujuan Strategis
70	WTP	=	Wajar Tanpa Pengecualian
71	WDP	=	Wajar Dengan Pengecualian

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN  
PENERAPAN TEKNOLOGI,

ttd

UNGGUL PRIYANTO